



LPPD 2021

Visit

KAPUAS HULU

Wisata Alam Sarai Berunyu,
Kec Bunut Hulu



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021**

**KAPUAS HULU
HEBAT!**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Penyusunan LPPD ini merupakan pelaksanaan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai laporan hasil implementasi asas otonomi daerah serta pelaksanaan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

LPPD ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang. Capaian Kinerja tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya dan referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan bagi Pemerintah Daerah.



Putussibau, 31 Maret 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.



D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Gambaran Umum Daerah	4
II.1. Gambaran Umum Pemerintahan	4
II.2. Gambaran Umum Geografis Wilayah	13
II.3. Gambaran Umum Demografis Daerah	19
II.4. Gambaran Umum Keuangan Daerah	23
III. Perencanaan Pembangunan Daerah	26
III.1. Permasalahan Strategis Pembangunan Daerah	26
III.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	34
III.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)	38
III.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	41
IV. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	50
IV.1. Dasar Hukum Penerapan SPM	50
IV.2. Kebijakan Umum SPM	53
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	54
I. Capaian Kinerja Makro	54
II. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	54
II.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	54
II.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	88
II.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	97
III. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	99



	III.1. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja	99
	III.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.	100
	III.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.	101
	III.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah	102
	III.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah di capai.	104
	III.6. Analisa Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja	115
BAB III	CAPAAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	121
BAB IV	PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	122
	I. PENDIDIKAN	122
	I.1. Jenis Pelayanan Dasar	122
	I.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	122
	I.3. Realisasi Capaian SPM	123
	I.4. Alokasi Anggaran	124
	I.5. Dukungan Personil	126
	I.6. Permasalahan dan Solusi	127
	II. KESEHATAN	128
	II.1. Jenis Pelayanan Dasar	128
	II.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	129
	II.3. Realisasi Capaian SPM	130
	II.4. Alokasi Anggaran	135
	II.5. Dukungan Personil	137
	II.6. Permasalahan dan Solusi	138
	III. PEKERJAAN UMUM	141
	III.1. Jenis Pelayanan Dasar	141
	III.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	141



III.3. Realisasi Capaian SPM	142
III.4. Alokasi Anggaran	142
III.5. Dukungan Personil	144
III.6. Permasalahan dan Solusi	145
IV. PERUMAHAN RAKYAT	145
IV.1. Jenis Pelayanan Dasar	146
IV.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	146
IV.3. Realisasi Capaian SPM	146
IV.4. Alokasi Anggaran	148
IV.5. Dukungan Personil	149
IV.6. Permasalahan dan Solusi	149
V. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	150
V.1. Jenis Pelayanan Dasar	150
V.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	151
V.3. Realisasi Capaian SPM	152
V.4. Alokasi Anggaran	153
V.5. Dukungan Personil	155
V.6. Permasalahan dan Solusi	156
VI. SOSIAL	157
VI.1. Jenis Pelayanan Dasar	158
VI.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	159
VI.3. Realisasi Capaian SPM	160
VI.4. Alokasi Anggaran	161
VI.5. Dukungan Personil	162
VI.6. Permasalahan dan Solusi	163
BAB V PENUTUP	165
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pemerintahan administrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang berkedudukan di Putussibau dibentuk pada tanggal 7 Januari 1953 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan, yang pada tanggal 4 Juli 1959 ditetapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820). Sejalan dengan semangat otonomi daerah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka nomenklatur Daerah Tingkat II Kapuas Hulu berubah menjadi Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah otonom di Kalimantan Barat, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi



daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan LPPD (RLPPD).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah, dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);



- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



- k. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

II. Gambaran Umum Daerah

II. 1. Gambaran Umum Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang profesional untuk masyarakat yang sejahtera, maju, cerdas, sehat, produktif melalui akselerasi pembangunan partisipatif berbasis ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fransiskus Diaan, S.H. dan Wahyudi Hidayat, S.T., merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih sebagai hasil Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2/PL.02.7-Kpt/6106/KPU-Kab/1/2021 tanggal 22 Januari tahun 2021 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat.



Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah. Berikut disampaikan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu menurut urusan yang dilaksanakan dan dasar hukumnya sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Nomenklatur Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu

No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016	- Pendidikan - Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016	Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan	Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016	- Lingkungan Hidup - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016	- Sosial - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016	- Perindustrian - Tenaga Kerja - Transmigrasi
10	Dinas Pertanian dan Pangan	Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016	- Pertanian - Pangan
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016	Perhubungan
14	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016	- Komunikasi dan Informasi - Statistik - Persandian
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016	- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016	Penanaman Modal
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016	- Kepemudaan dan Olahraga - Pariwisata



No.	Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Urusan yang dilaksanakan
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016	- Perpustakaan - Kearsipan
19	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016	Kelautan dan Perikanan
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016	Perencanaan, penelitian dan pengembangan
21	Badan Keuangan Daerah	Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016	Perencanaan Keuangan dan Manajemen Keuangan
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
23	Inspektorat	Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016	Pengawasan dan Perencanaan Keuangan
24	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016	- Pertanahan - Administrasi Pemerintahan - Kesatuan Bangsa dan Politik
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan
26	Badan Pengelola Perbatasan	Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2019 .	Administrasi Pemerintahan
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021	Administrasi Pemerintahan Umum
27	Kecamatan	Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan
28	Kelurahan	Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan berjumlah 23 (dua puluh tiga) unit kerja, yang terdiri dari:

1. Kecamatan Putussibau Utara
2. Kecamatan Putussibau Selatan
3. Kecamatan B i k a



4. Kecamatan Kalis
5. Kecamatan Mentebah
6. Kecamatan Boyan Tanjung
7. Kecamatan Pengkadan
8. Kecamatan Hulu Gurung
9. Kecamatan Seberuang
10. Kecamatan Semitau
11. Kecamatan Suhaid
12. Kecamatan Selimbau
13. Kecamatan Jongkong
14. Kecamatan Bunut Hilir
15. Kecamatan Bunut Hulu
16. Kecamatan Embaloh Hilir
17. Kecamatan Embaloh Hulu
18. Kecamatan Batang Lupar
19. Kecamatan Badau
20. Kecamatan Empanang
21. Kecamatan Puring Kencana
22. Kecamatan Silat Hilir
23. Kecamatan Silat Hulu

Adapun Kelurahan berjumlah 4 (empat) unit kerja, yang terdiri dari :

1. Kelurahan Putussibau Kota;
2. Kelurahan Hilir Kantor
3. Kelurahan Kedamin Hulu
4. Kelurahan Kedamin Hilir

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga telah membentuk Unit Perangkat Daerah (Unit Pelaksana Teknis/UPT) berjumlah 543 unit kerja, adapun Nomenklatur UPT sebagaimana tabel berikut.



Tabel 1.2.
Nomenklatur Unit Perangkat Daerah
(Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) di Lingkungan
Pemerintah Kapuas Hulu

No.	Unit Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Keterangan
1	UPT. Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017	1 unit kerja
2	UPT. Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakaryaan	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017	1 unit kerja
3	UPT. Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase	Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017	2 unit kerja - Wilayah I - Wilayah II
4	UPT. Pembenihan, Pembibitan Kesehatan Hewan	Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017	1 unit kerja
5	UPT. Benih Ikan	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017	1 unit kerja
6	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro	Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018	1 unit kerja
7	UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018	23 unit kerja (di 23 Kecamatan)
8	UPT. Satuan Pendidikan	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019	- Pendidikan Usia Dini sebanyak 22 unit kerja - Pendidikan Dasar sebanyak 490 unit kerja
9	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Semitau	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019	1 unit kerja

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



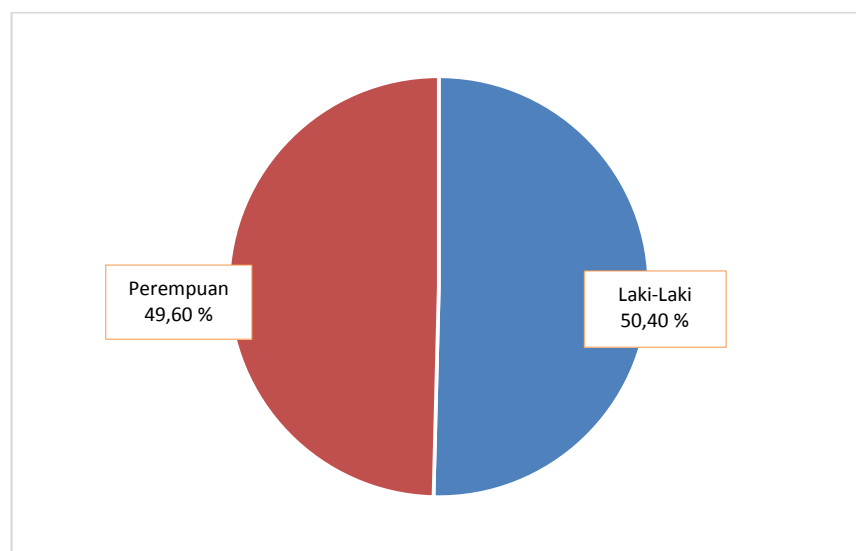
Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, Perangkat Daerah didukung oleh sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan yang melekat pada urusan Pemerintahan Wajib, Pilihan dan Penunjang. Berikut disampaikan gambaran umum keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data per 31 Desember 2021, yang merupakan deskripsi PNS dari kategori Jenis Kelamin, Golongan Ruang Kepangkatan dan Pendidikan Formal.

a) PNS Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 4748 orang yang terdiri dari 2.393 orang laki-laki dan 2.355 orang perempuan. Gambar berikut menunjukkan bahwa prosentase jumlah PNS laki-laki lebih besar (50,40%) dari prosentase jumlah PNS perempuan (49,60%).

Gambar 1.1.

PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



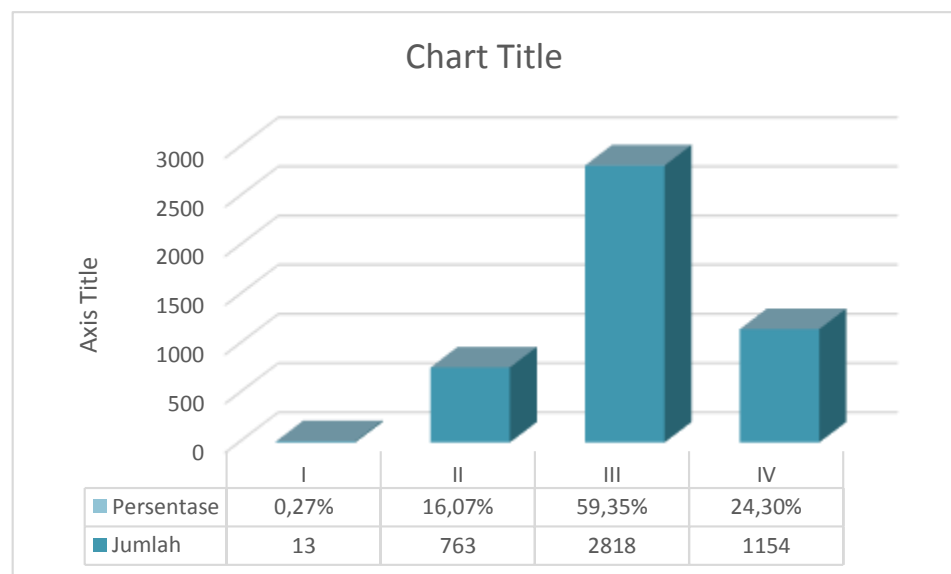
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.



b) PNS Menurut Golongan Ruang Kepangkatan

Pada Tahun 2021 PNS dengan Golongan III merupakan kelompok terbesar yaitu sebanyak 2.819 orang atau sebesar 58.43% dari jumlah seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian secara berturut-turut adalah Golongan III 2818 orang (59.35%) Golongan IV sebanyak 1154 orang (24.30%) Golongan II sebanyak 763 orang (16.07%), dan Golongan I sebanyak 13 orang (0,27%). Distribusi Golongan Ruang Kepangkatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1.2.
PNS Berdasarkan Golongan Ruang



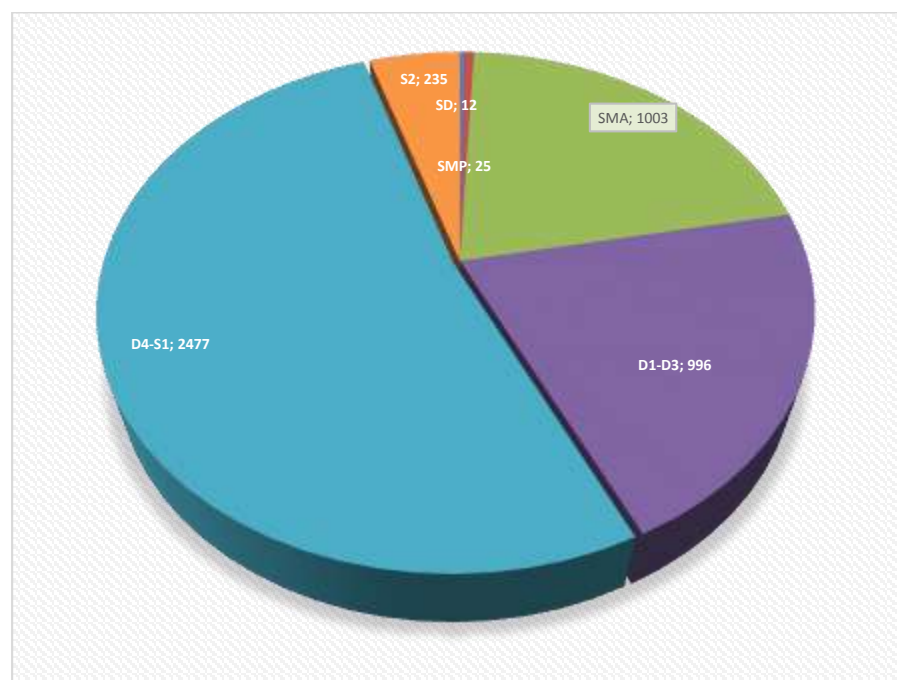
Sumber : *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu*



c) PNS Menurut Pendidikan Formal

Pada akhir Desember 2021, PNS yang berpendidikan S1 / D-IV sebanyak 2.477 orang (52.17%), selanjutnya secara berturut-turut PNS berpendidikan SLTA sebanyak 1003 orang (21.12%), D1-D3 sebanyak 996 orang (20.98%), S2 sebanyak 235 orang (4,95%), SLTP sebanyak 25 orang (0.53%), dan SD sebanyak 12 orang (0,25%). Distribusi PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.3.
PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu



II. 2. Gambaran Umum Geografis Wilayah

II.2.1. Batas Administrasi Daerah

Kedudukan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, secara astronomis terletak pada koordinat 0°5' Lintang Utara sampai 1°4' Lintang Selatan dan di antara 111°40' sampai 114°10' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.

Jarak dari Putussibau (ibukota Kabupaten Kapuas Hulu) dengan Pontianak (ibukota Propinsi Kalimantan Barat) adalah ± 657 km melalui jalan darat dan ± 842 km melalui jalur sungai Kapuas serta ± 1 jam 15 menit penerbangan.

II.2.2. Luas Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah $\pm 29.842,03$ km², atau mencakup 20.33% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan kabupaten terluas, setelah Kabupaten Ketapang dan secara administratif memiliki 23 Kecamatan dengan 4 Kelurahan, dan 278 Desa, dengan rincian per Kecamatan, seperti pada tabel berikut ini.



Tabel 1.3.
Data Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km ²)
1	Putussibau Utara	2	17	5.204,80
2	Putussibau Selatan	2	14	5.352,33
3	B i k a	-	8	392,16
4	Kalis	-	17	1.853,84
5	Mentebah	-	8	771,26
6	Boyan Tanjung	-	16	822,00
7	Pengkadan	-	11	531,20
8	Hulu Gurung	-	15	431,90
9	Seberuang	-	15	570,80
10	Semitau	-	12	562,70
11	Suhaid	-	11	462,91
12	Selimbau	-	17	1.143,88
13	Jongkong	-	14	442,50
14	Bunut Hilir	-	11	882,10
15	Bunut Hulu	-	15	1.118,14
16	Embaloh Hilir	-	9	784,30
17	Embaloh Hulu	-	10	3.452,60
18	Batang Lupar	-	10	1.332,90
19	Badau	-	9	700,00
20	Empanang	-	6	543,15
21	Puring Kencana	-	6	257,66
22	Silat Hilir	-	13	1.167,10
23	Silat Hulu	-	14	1.061,80
Jumlah		4	278	29.842,03

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.



Dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, seluas ± 3.900 km² merupakan daerah perairan atau tergenang (13,07 % dari luas daerah tergenang di seluruh wilayah Kalimantan Barat) dan selebihnya seluas ± 25.942 km² merupakan daerah daratan atau daerah tidak tergenang. Sementara 16.776,01 km² atau $\pm 56,21$ % merupakan kawasan lindung, termasuk kawasan konservasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Taman Nasional Betung Kerihun : 8.000 km²
2. Taman Nasional Danau Sentarum : 1.320 km²
3. Hutan Lindung : 6.289,73 km²
4. Daerah Resapan Air : 495,46 km²
5. Lahan Gambut : 670,82 km²

II.2.3. Topografi dan Iklim

1) Topografi

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dataran rendah serta daerah danau dan rawa yang berair. Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya adalah Sungai Kapuas. Di Kabupaten Kapuas Hulu sungai masih memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi penumpang dan barang dari Putussibau ke kota-kota lain yang berada di jalur sungai kapuas dan ke Kecamatan. Pertanian yang agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah telah mempengaruhi banyak dataran pinggiran Daerah Aliran Sungai ini.



Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering terjadi banjir musiman, dengan ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter bahkan lebih. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk kuali yang terdiri dari daratan rendah atau cekungan yang terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup dalam. Pada dataran rendah ini terdapat Ibukota Kecamatan yang penduduknya relative ramai, dataran rendah ini berada pada ketinggian 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Dataran tinggi/miring ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis. Sebagian besar daerah dengan ketinggian di atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang melingkar sampai ke Pegunungan Muller dekat perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara dan Timur gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Topografi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu bervariasi dari dataran alluvial, perbukitan sampai pegunungan. Permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0-2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di



Kecamatan Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Jongkong, Hulu Gurung, Pengkadan dan Empanang bagian Utara. mempunyai kemiringan 2-15%. Sementara daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15-40%.

2) Iklim

a. Curah Hujan

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama. Di Kabupaten Kapuas Hulu curah hujan cukup tinggi dalam satu tahun berkisar antara 3300 mm sampai 5000 mm dengan jumlah hari hujan antara 240 - 260 per tahun dan jumlah curah hujan maksimum dapat terjadi berkisar antara 29 – 124 mm/hari.

b. Musim

Terdapat 2 (dua) musim di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan juni sampai dengan bulan September. Sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November.



c. Suhu dan Kelembaban

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Maksimum curah hujan ganda dan dengan suhu rata-rata dalam bulan terpanas lebih tinggi dari 22°C. Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu suhu minimum rata-rata per tahun adalah 21,5°C hingga 23,2°C dan suhu maksimum rata-rata per tahun adalah 32,3°C sampai 34,7°C. Tingginya suhu udara di Kapuas Hulu disebabkan antara lain karena letak Kabupaten Kapuas Hulu yang relatif dekat dengan garis khatulistiwa dan struktur geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang secara umum berada pada wilayah dataran cukup tinggi.

d. Hidrologi

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas Hulu sampai di bagian timur Kalimantan Barat, dan memiliki puluhan anak sungai yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya adalah Sungai Embaloh dengan panjang ± 168 Km yang berhulu di pegunungan Kapuas Hulu di Bagian Utara, Sungai Manday sepanjang sekitar 140 Km, yang mengalir dari pegunungan Muller. Pola perairan di Kabupaten Kapuas Hulu juga diwarnai dengan banyaknya Danau Depresi di daerah-daerah pelembaban dan Danau Oxbow di daerah-daerah meander sungai. Danau-danau ini merupakan sumber penghasilan ikan yang cukup potensial di Kecamatan Selimbau, Semitau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong dan Badau.



II.3. Gambaran Umum Demografis Daerah

II.3.1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor utama sebagai modal dasar pembangunan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 259.512 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 133.013 jiwa (51,26%) dan penduduk perempuan sebanyak 126.499 jiwa (48,74%).

Dengan luas wilayah yang mencapai 29.842,03 km², Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk 8,69 jiwa/km², hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu relatif kecil dan mayoritas bertempat tinggal di pedesaan. Secara umum, penyebaran penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tidak merata dan membentuk pola linear sesuai jalur Sungai Kapuas dan jalur jalan. Pengelompokan penduduk terutama terdapat pada kecamatan-kecamatan yang memiliki akses tinggi ke jalur pelayaran Sungai Kapuas dan jalur jalan darat.

II.3.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Struktur kependudukan berdasarkan jenis kelamin selain untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan juga digunakan untuk mengetahui rasio jenis kelamin suatu wilayah yang digunakan untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Pada tahun 2021 komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikemukakan sebagai berikut :



Tabel. 1.4.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Putusibau Utara	14.069	13.644	27.713
2.	Bika	2.496	2.348	4.844
3.	Embaloh Hilir	3.067	2.928	5.995
4.	Embaloh Hulu	2.685	2.572	5.257
5.	Bunut Hilir	4.399	4.291	8.690
6.	Bunut Hulu	7.812	7.429	15.241
7.	Jongkong	5.607	5.556	11.163
8.	Hulu Gurung	7.138	6.911	14.049
9.	Selimbau	6.965	6.727	13.692
10.	Semtau	4.971	4.586	9.557
11.	Seberuang	5.951	5.509	11.460
12.	Batang Lupar	2.771	2.696	5.467
13.	Empanang	1.925	1.778	3.703
14.	Badau	3.543	3.417	6.960
15.	Silat Hilir	10.648	9.842	20.490
16.	Silat Hulu	6.073	5.584	11.657
17.	Putusibau Selatan	12.271	11.845	24.116
16.	Kalis	7.182	6.760	13.942
19.	Boyan Tanjung	6.818	6.363	13.181
20.	Mentebah	5.683	5.290	10.973
21.	Pengkadan	4.897	4.638	9.535
22.	Suhaid	4.818	4.682	9.500
23.	Puring Kencana	1.224	1.103	2.327
	JUMLAH	133.013	126.499	259.512

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2021.



Dari Tabel 1.4. diatas dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 105,15 %. Angka tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.65%.

II.3.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Struktur penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan usia penduduk merupakan hal penting dikarenakan dengan mengetahui struktur usia penduduk maka dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk yang menjadi indikator keadaan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi angka rasio ketegantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Jika dilihat dari komposisi usia, pada tahun 2021 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 180.731 jiwa atau 69,64 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (usia <15 tahun ditambah dengan usia >65 tahun) sebanyak 78.781 jiwa atau 30,36 persen, sehingga angka rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 adalah sebesar 43,59, hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 43-44 orang penduduk usia non produktif. Lebih lanjut jumlah penduduk berdasarkan komposisi usia disampaikan sebagai berikut:



Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	0 - 4 Tahun	18.402	7.09%
2.	5 - 9 Tahun	23.813	9.18%
3.	10 - 14 Tahun	24.724	9.53%
4.	15 - 19 Tahun	20.624	7.95%
5.	20 - 24 Tahun	22.810	8.79%
6.	25 - 29 Tahun	20.627	7.95%
7.	30 – 34 Tahun	20.403	7.86%
8.	35 – 39 Tahun	22.747	8.77%
9.	40 – 44 Tahun	20.452	7.88%
10.	45 – 49 Tahun	18.277	7.04%
11.	50 – 54 Tahun	14.889	5.74%
12.	55 – 59 Tahun	11.365	4.38%
13.	60 – 64 Tahun	8.537	3.29%
14.	65 – 69 Tahun	5.370	2.07%
15.	70 – 74 Tahun	3.636	1.40%
16.	> 75 Tahun	2.836	1.09%
	Jumlah	259.512	100,00%

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2021.

II.3.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan diperlukan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dan jenis pendidikan yang mendominasi suatu wilayah. Apabila dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu dari tingkat pendidikan masyarakat, maka rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah tamat Sekolah Dasar/ sederajat yaitu sebesar 27,768% atau sejumlah 69.467 jiwa, lebih lanjut disampaikan jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 1.6.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Tidak/Belum Sekolah	56.895	21.924%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	39.945	15.392%
3.	Tamat SD/Sederajat	69.467	26.768%
4.	SLTP/Sederajat	37.297	14.372%
5.	SLTA/Sederajat	42.411	16.343%
6.	Diploma I/II	1.601	0.617%
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	3.436	1.324%
8.	Diploma IV/Strata 1	8.207	3.162%
9.	Strata 2	246	0.095%
10.	Strata 3	7	0.003%
	Jumlah	259.512	100,00

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Laporan Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2021.

II. 4. Gambaran Umum Keuangan Daerah

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian Keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada azas umum pengelolaan Keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.



. 2. Pengelolaan Belanja Daerah

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang Keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan Keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan mendasarkan pada '*value for money*'. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

. 2. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA).

Pada tabel 1.7. disampaikan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut.



Tabel 1.7.
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.757.060.938.005,81	1.770.710.171.372,65
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.160.900.204,06	78.657.172.950,63
4.1.01.	Pajak Daerah	14.278.030.000,00	14.638.951.445,43
4.1.02.	Retribusi Daerah	5.416.953.525,00	5.004.388.208,75
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.703.075.392,28	13.703.075.392,28
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	42.762.841.286,78	45.310.757.904,17
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.615.513.116.592,75	1.625.328.412.470,75
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.556.929.222.000,00	1.569.062.082.728,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.583.894.592,75	56.266.329.742,75
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	65.386.921.209,00	66.724.585.951,27
4.3.01.	Pendapatan Hibah	655.117.105,00	9.434.076.226,34
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	64.731.804.104,00	57.290.509.724,93
5.	BELANJA DAERAH	1.805.316.788.090,42	1.744.082.545.698,69
5.1.	BELANJA OPERASI	1.022.051.416.791,42	975.375.172.866,68
5.1.01.	Belanja Pegawai	527.606.339.780,42	510.214.277.424,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	393.180.959.200,00	369.134.655.378,15
5.1.05.	Belanja Hibah	96.667.839.811,00	92.216.771.128,53
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	4.596.278.000,00	3.809.468.936,00
5.2.	BELANJA MODAL	393.467.736.339,00	382.251.203.530,01
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.818.496.205,00	1.671.413.931,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.782.066.600,00	43.181.976.191,42
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.251.760.989,00	161.145.755.682,87
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.046.757.545,00	174.703.404.024,72
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.568.655.000,00	1.548.653.700,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.524.967.760,00	13.958.663.232,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	15.524.967.760,00	13.958.663.232,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	374.272.667.200,00	372.497.506.070,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	2.042.950.000,00	2.042.950.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	372.229.717.200,00	370.454.556.070,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(48.255.850.084,61)	26.627.625.673,96
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	58.255.850.084,61	58.255.850.084,61



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.255.850.084,61	53.255.850.084,61
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.255.850.084,61	53.255.850.084,61
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.Z.	PEMBIAYAAN NETTO	48.255.850.084,61	48.255.850.084,61
6.Z.Z.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	74.883.475.758,57

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, keadaan per 31 Desember 2021 (unaudited) di keluarkan tanggal 14 Februari 2022

III. Perencanaan Pembangunan Daerah

III. 1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, suatu kebijakan pembangunan dimaknai sebagai prioritas pembangunan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan harus dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam RKPD selama lima tahun. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, terdapat 4 (empat) permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah teridentifikasi, yaitu :

- Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Masih tingginya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah
- Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Ke-empat permasalahan utama tersebut mengakibatkan belum meratanya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.4.
Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber : *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021*

Ke-empat permasalahan utama yang telah diidentifikasi tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga untuk dapat menyelesaikannya maka terlebih dahulu Perangkat Daerah harus dapat menyelesaikan akar masalah yang menjadi pangkal dari masalah Perangkat Daerah. Lebih lanjut digambarkan keterkaitan antara permasalahan utama, dengan permasalahan dan akar masalah sebagaimana tabel berikut.



Tabel 1.8.
Keterkaitan antara Masalah Utama Daerah, Masalah dan Akar Masalah

Permasalahan Utama	Masalah	Akar Masalah
I. Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Integritas Aparatur dan Pengelolaan Keuangan belum optimal	1. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	a. Belum optimalnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah
		b. Belum optimalnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah
		c. Masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketata-laksanaan pemerintah untuk mendukung akselerasi pembangunan
	2. Belum optimalnya integritas aparatur dalam melayani	a. Penyediaan pelayanan dasar dan pemenuhan hak-hak masyarakat belum sepenuhnya dapat dipenuhi secara adil dan merata
		b. Masih rendahnya disiplin aparatur dalam melayani masyarakat
		c. Belum adanya SOP terkait pelayanan publik
	3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	a. Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum terkelola dengan maksimal
		b. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran daerah
II. Belum Optimalnya pemanfaatan SDA, pariwisata, distribusi pendapatan serta rendahnya kualitas SDM	1. Belum optimalnya pemanfaatan SDA untuk peningkatan perekonomian masyarakat	a. Mata pencaharian penduduk sektor pertanian masih bersifat monokultural
		b. Masih rendahnya kualitas komoditas tanaman perkebunan sehingga belum mendukung permintaan pasar khususnya untuk ekspor
		c. Semakin menurunnya produktivitas pertanian
		d. Masih rendahnya kesejahteraan petani
		e. Cara beternak yang masih bersifat tradisional
		f. Masih rendahnya produksi perikanan bila dibandingkan dengan potensi yang ada
	2. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata daerah	a. Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata
		b. Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata
		c. pemasaran pariwisata belum optimal



Permasalahan Utama	Masalah	Akar Masalah
	3. Belum optimalnya pemerataan pen-dapatan masyarakat	a. Kegiatan ekonomi masih terpusat di ibu kota kabupaten
		b. Masih terbatasnya kesempatan kerja dan kegiatan usaha di perdesaan
		c. Lambatnya pertumbuhan sektor riil
	4. Masih Rendahnya kualitas SDM masyarakat Kapuas Hulu	a. Belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan pendidikan
		b. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal dan merata
		c. Masih rendahnya daya beli masyarakat
III. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar	a. Mata pencaharian penduduk sektor belum meratanya pembangunan infrastruktur perhubungan
		b. Pemanfaatan air bersih untuk rumah tangga masih rendah
		c. Masih rendahnya ketersediaan listrik di perdesaan
		d. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata
IV. Pembangunan Belum Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	a. Kejadian kebakaran hutan yang intensitas dan frekuensinya cukup tinggi akibat peningkatan alih fungsi lahan
		b. Semakin meningkatnya kegiatan penambangan kayu/hutan secara liar (<i>illegal logging</i>), perdagangan liar (<i>illegal trading</i>), penambangan emas ilegal yang hanya berorientasi kepentingan ekonomi jangka pendek

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga menghadapi berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, sebayang terdiri dari Isu Internasional, Isu atau Kebijakan Nasional (RPJMN 2015-2019) dan Isu Atau Kebijakan Daerah. Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu tersebut, maka isu strategis Kabupaten Kapuas Hulu dapat disampaikan sebagai berikut:



a. Belum Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan. Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peranserta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat.

Selain itu, Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak meninggalkan permasalahan diantaranya adalah tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal upaya



check and balance kekuasaan dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan.

- b. Belum Optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah dengan luas $\pm$ 29.842 km², atau mencakup 20,33 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Ketapang membuat potensinya sungguh sangat luar biasa. Selain itu, salah satu kekuatan ekonomi bagi Kabupaten Kapuas Hulu adalah ditetapkannya beberapa kecamatan sebagai Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Peningkatan nilai tambah dari produk-produk sumberdaya alam belum sepenuhnya terwujud baik dari aspek sosial, budaya dan ekologi. Efisiensi dan daya saing pemanfaatan sumberdaya alam terutama untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu relatif masih rendah. Belum tercipta keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dengan aspek pengembangannya. Tingkat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terbarukan semakin meningkat dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah juga kian meningkat

Pemanfaatan sumber daya alam yang demikian potensial, perlu didukung dengan pengembangan industri kecil menengah sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan. Dengan demikian,



pemanfaatan SDA ini berdampak pada meningkatnya nilai tambah produk hasil olahan SDA yang nantinya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan

c. Masih Tingginya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan pemerataan pembangunan sulit diwujudkan. Minimnya dana pembangunan ekonomi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu penyebab utama. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana pembangunan terserap pada belanja pegawai sehingga porsi untuk peningkatan infrastruktur dasar menjadi berkurang.

Panjang jalan kabupaten di Kapuas Hulu adalah 1.186,874 Km dengan rincian jenis permukaan masing-masing 166,862 Km berupa jalan aspal, 334,786 Km jalan kerikil, Rigid Beton 172,728 Km dan jalan tanah sepanjang 512,498 Km. Kondisi jaringan jalan umumnya masih dalam kondisi rusak (11,30 %) dan rusak berat (42,00%), hanya sekitar (35,07%) jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan sisanya sekitar (11,62%) dalam kondisi sedang. Jembatan yang dibangun sampai tahun 2015 adalah sepanjang 6.575,20 Km, atau (612 buah). Jumlah jembatan yang dalam kondisi baik dan layak dilalui sebanyak 480 buah (78,43%) jembatan, kondisinya sedang 61 buah, rusak ringan 40 buah dan rusak berat 31 buah. Sebagian besar jalan kolektor dan lokal masih berupa jalan yang diperkeras yang memiliki mutu lapis perkerasan yang rendah. Sarana angkutan yang tersedia terbatas, disamping itu dari 6 terminal yang ada, hampir seluruhnya tidak berfungsi dengan baik dan tidak terawat. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung secara memadai, kualitas dan representatif yang menjamin keselamatan penumpang, cenderung menyebabkan minat masyarakat yang semakin menurun.



Kendala dibidang energi kelistrikan adalah keterbatasan dana dan investor untuk melakukan investasi dalam pengembangan berbagai sumber energi alternatif. Kondisi ini dipicu oleh adanya kendala fisik geografis serta terbatasnya SDM yang terdidik dan terampil.

Pemanfaatan air bersih melalui fasilitas yang dikelola oleh PDAM yang merupakan faktor utama dalam menunjang kesehatan penduduk, ternyata pemanfaatannya tercatat masih rendah yakni sekitar 13,18%. Umumnya penduduk Kabupaten Kapuas Hulu masih mengandalkan sumber air dari aliran Sungai Kapuas baik untuk kebutuhan air minum maupun kebutuhan sehari-harinya (86,82%). Sistem pelayanan sarana air bersih hingga tahun 2015 dilayani oleh 1 PDAM dengan sumber air baku dari air sungai dan baru menjangkau Kota Putussibau dan beberapa kecamatan saja. Hingga tahun 2015, jumlah pelanggan yang terlayani jaringan air bersih dari saluran pipa air PDAM adalah sebanyak 10.336 pelanggan, dengan rincian untuk rumah tempat tinggal sebanyak 9.716 pelanggan, dan perusahaan dan pertokoan sebesar 620 pelanggan. Sementara itu, produksi air bersih yang disalurkan kepada pelanggan tahun 2015 sebanyak 3.544.225 m³, dengan besarnya sebesar Rp 53.526.661.095,- dimana juga terjadi kebocoran sebanyak 1.030.192 m³. Selain masih terbatasnya infrastruktur dasar, masalah perumahan juga menjadi kendala di Kabupaten Kapuas Hulu. sampai saat ini masih terdapat kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 11,23 persen. hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten agar dapat menata kawasan kumuh terutama di perkotaan.

d. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah belum optimalnya upaya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan. Kabupaten Kapuas Hulu harus bertekad untuk memproyeksikan



daerahnya menjadi daerah yang mampu mengelola SDA dan Lingkungan secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat mewujudkan tumbuhnya kenyamanan, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, generasi sekarang dan selanjutnya.

Degradasi lingkungan dapat diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya komponen-komponen lingkungan secara baik dan sebagaimana mestinya. Degradasi lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara alamiah. Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan asli. Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses pembuangan limbah pabrik langsung ke sungai/laut serta pencemaran udara dari aktivitas pabrik.

III. 2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Pernyataan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), semua



Provinsi serta Kabupaten dan Kota wajib menyusun RPJPD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Selanjutnya RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Serta, Memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode tahun 2016-2021. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016`-2021, yang dirubah terakhir kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah **“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”**.

Visi tersebut menjadi arah pembangunan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menuju kondisi ideal yang diinginkan. Visi tersebut terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu sejahtera,



berdaya saing, dan harmonis yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kapuas Hulu yang **Sejahtera**, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan batin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
- b. Kapuas Hulu yang **Berdaya Saing**, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- c. Kapuas Hulu yang **Harmonis**, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka kesejahteraan dan daya saing Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat tercapai. Hal tersebut sesuai dengan intisari dari visi yang ditetapkan yaitu Kapuas Hulu menjadi beranda NKRI yang sejahtera, berdaya saing dan harmonis. Hal tersebut merupakan cita-cita atau *ultimate goals* yang menggambarkan kondisi dimana Kapuas Hulu sebagai Kabupaten terdepan NKRI yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi sebagai beranda terdepan NKRI.

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara Pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:



Misi Pertama : *Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih.*

Misi ini bertujuan terselenggaranya Pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

Misi Kedua : *Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan.*

Misi ini bertujuan untuk meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80% penduduk Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Misi Ketiga : *Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk



pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggirannya sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

III. 3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD

Program pembangunan daerah dirumuskan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka dirumuskan strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan. Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan dan disertai dengan kerangka



pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Adapun Program-program pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan untuk masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2016 - 2021, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.9.
Program-Program Pembangunan Daerah berdasarkan
RPJMD Tahun 2016-2021

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Program perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/PD yang menyelenggarakan Urusan Perencanaan
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Badan Keuangan Daerah
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat
	Program Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
	Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan



Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Perikanan
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan kualitas Pembangunan SDM masyarakat Kapuas Hulu	Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Kesehatan Ibu, Balita dan keluarga	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi / Mutu pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Dinas Kesehatan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah	Program Pembangunan Jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya



Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021

III. 4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 merujuk pada program prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 dan dirancang berdasarkan perencanaan pada masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berbagai urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Kapuas Hulu. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2021. Berikut disampaikan Program dan Kegiatan Prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.



Tabel 1.10.
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan sesuai RKPD

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
I	PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNGGULAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan penataan desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan terminal penumpang tipe C Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya	DINAS PERIKANAN



NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
			yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	
			Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (tpe)	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	
			Pengelolaan pembudidayaan ikan	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	
			Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	
			Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	
			Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	
			Pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	
			Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	
			Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	
			Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota	
			Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan prasarana pertanian	
			Pembangunan prasarana pertanian	
			Pengembangan lahan penggembalaan umum	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	
			Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota	
			Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	



NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Administrasi keuangan perangkat daerah	
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	
			Administrasi umum perangkat daerah	
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
			Penataan organisasi	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	
			Layanan keuangan dan kesejahteraan dprd	SET DPRD
			Layanan administrasi DPRD	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	
			Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	
			Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	
			Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	



NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal	
			Pendayagunaan tenaga penyuluh kb/petugas lapangan kb (pkb/plkb)	
			Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di daerah kabupaten/kota	
			Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-kb	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan pendaftaran penduduk	
			Penataan pendaftaran penduduk	
			Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan pencatatan sipil	
			Penyelenggaraan pencatatan sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan profil kependudukan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	
			Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	
			Pengujian berkala kendaraan bermotor	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha	
			Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	
			Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	
			Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	
			Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	
			Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	
			Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	



NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	
			Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi tata pemerintahan	
			Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	
			Fasilitasi kerjasama daerah	
			Fasilitasi dan koordinasi hukum	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	
			Pelaksanaan administrasi pembangunan	
			Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	
			Pemantauan kebijakan sumber daya alam	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	SET DPRD
			Pembahasan kebijakan anggaran	
			Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
			Peningkatan kapasitas dprd	
			Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	
			Pelaksanaan dan pengawasan kode etik dprd	
			Fasilitasi tugas DPRD	



NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	BAPPEDA
			Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda (sumber daya alam)	
			Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	
			Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	
			Pengembangan inovasi dan teknologi	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	BKD
			Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	
			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	
			Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	
			Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan barang milik daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian asn	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Mutasi dan promosi asn	
			Pengembangan kompetensi asn	
			Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan kompetensi teknis	
			Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Perencanaan dan fasilitasi kerja sama	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
			Pelaksanaan kewilayahan perbatasan	
			Monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan pengawasan internal	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Pendampingan dan asistensi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	KECAMATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	
			Kegiatan pemberdayaan kelurahan	
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	
II	PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan pelayanan blud	DINASKESHEATAN
			Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	
			Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	
			Penerbitan izin rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	



NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	
			Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk ukp dan ukm di wilayah kabupaten/kota	
			Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)	
			Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor p-irt sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	
			Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (tpm) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (dam)	
			Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	
			Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	
			Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (ukbm) tingkat daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan penyelenggaraan psu perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan pengarusutamaan gender (pug) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (kg) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan rencana tenaga kerja (rtk)	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	
			Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
			Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	



NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	
III	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN SDA
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)	
			Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (imb) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan rencana tata ruang wilayah (rtw) dan rencana rinci tata ruang (rrtr) kabupaten/kota	
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	
			Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	
			Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	



NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	BPBD
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	
			Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (klhs) kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	
			Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	
			Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pph diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Peningkatan kapasitas mha dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak mha yang terkait dengan pph	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) kabupaten/kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan sampah	

Sumber : Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

IV. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

IV. 1. Dasar Hukum Penerapan SPM

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akutanbel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Pemerintah telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai



upaya mengurangi variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas urusan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara umum, kebijakan penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu, mendorong transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui bagaimana kualitas pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan Pemerintah. Adapun pedoman penyelenggaraan SPM yang terkait dengan mutu pelayanan dasar adalah sebagai berikut:



- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Standar Minimal Bidang Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
- g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berkaitan dengan penerapan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu.



IV. 2. Kebijakan Umum SPM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Sebagai upaya penerapan SPM di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 telah ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang dicapai melalui kebijakan perbaikan kualitas layanan publik, dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari tugas dan fungsi unit kerja tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan pembiayaan melalui APBD. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. Capaian Kinerja Makro

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan program pemerintah, pemerintah daerah dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dengan indikator kinerja makro yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Adapun capaian Kinerja Makro tahun 2021 dan peningkatan atau pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Pertumbuhan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,69	65,75	0,091%
2	Angka Kemiskinan	8,99	8,93	-0.667%
3	Angka Pengangguran	4,02	4,18	3,98%
4	Pertumbuhan Ekonomi	-2,43	4,43	282,305 %
5	Pendapatan Per Kapita	24.697 Juta	25.660 Juta	3,899 %
6	Ketimpangan Pendapatan	0,325	0,278	-14,462

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

II. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

II. 1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

Berikut disampaikan capaian indikator kinerja kunci keluaran (*output*) pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



1. URUSAN PENDIDIKAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah Satuan pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3910		
3.	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3910		
4.	Jumlah kebutuhan minimal pen-didik PAUD (Negeri dan Swasta)	620		
5.	Jumlah Pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	912		
6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yg memiliki ijazah D-IV atau S-1 bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	134		
7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	76		
8.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	700		
9.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	29092		
10.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	13538		
11.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	29092		
12.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	13538		
13.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4232		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
14.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1275		
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1323		
16.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	434		
17.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan swasta)	1281		
18.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	476		
19.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	447		
20.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	169		
21.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 dan sertifikat pendidik	1000		
22.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S-1 dan sertifikat pendidik	406		
23.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	745		
24.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	54		
25.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	21		
26.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat.	7		
27.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	4		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
28.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	548		
29.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	548		
30.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	155		
32.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	101		
33.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV dan S-1	66		
34.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	745		
35.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	2		

2. URUSAN KESEHATAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3 unit	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3 unit		
3.	Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk pelayanan antenatal yang tersedia	10250		
4.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal sesuai standar	1231 orang		
5.	Jumlah dukungan logistik kesehatan pelayanan persalinan yang tersedia	12054		
6.	Jumlah SDM kesehatan utk pelayanan persalinan sesuai standar	1.231 orang		
7.	Jumlah dukungan logistik kesehatan pelayanan neonatal esensial yang tersedia	29830		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
8.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1231 orang		
9.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan neonatal esensial	1.074.165		
10.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1288 orang		
11.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita	2492		
12.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1357 orang		
13.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yg tersedia utk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	32397		
14.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun sesuai standar	1525 orang		
15.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yg tersedia untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun	2200		
16.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar	1353 orang		
17.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas	4604		
18.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	92 orang		
19.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yg tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi Kartu Menuju Bugar Anak Sekolah	1202		
20.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar	92 orang		
21.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita DM	4000		
22.	Jumlah SDM kesehatan untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Berat sesuai standar	38 orang		
23.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita ODGJ Berat	27330		
24.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar	115 orang		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
25.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita TBC	10970		
26.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV sesuai standar	115 orang		

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten(ha)	0	Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air	
2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	0		
3.	Luas kawasa permukiman sepanjang pantai yang rawan abarasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	45,312 ha		
4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	45,312 ha		Bangunan Perkuatan Tebing
5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten	Tidak Ada		
6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kereenangan kabupaten	Tidak Ada		
7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	484,54 m		Bangunan Perkuatan Tebing
8.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	33,2%		
9.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	12,66%		
10.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	50,09%		
11.	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada	Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya	
12.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten	Tidak ada		suket
13.	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggara SPAM	Ada		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
14.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		suket
15.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah lain	0		suket
16.	Jumlah rumah dengan akses untuk pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	44562 unit		
17.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0		
18.	Jumlah rumah dengan akses untuk pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	44562 unit		
19.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0		
20.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0		
21.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0		
22.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	74%		
23.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0		
24.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0		
25.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	75		
26.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0		Tidak memiliki mobil tinja
27.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0		
28.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0		
29.	Kinerja Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0		
30.	Rasio bangunan gedung(kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
31.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	282		
32.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada		
33.	Penetapan keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak Ada		
34.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	8 buah		
35.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	0 buah		
36.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten	1877 buah		
37.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	8 buah		
38.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	1108,33	Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air	
39.	Panjang jalan yang dibangun	0		
40.	Panjang jembatan yang dibangun	89.5		
41.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	21.376 Km		
42.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	406.85		
43.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	32123.18 Km		
44.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	1008.6 M		
45.	Panjang jalan yang dipelihara	32.123 Km		
46.	Panjang jembatan yang dipelihara	1008.6 M		
47.	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	2		
48.	Jumlah tenaga kerja operator/teknis/analisis yang terlatih di wilayah kab./kota	254		
49.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten	254		
50.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi/cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	1		
51.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun	396		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten			
52.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab. untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	18		
53.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	20		
54.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1		
55.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	2		
57.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab./kota yg dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis.	254		
58.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator /teknisi/analisis di wilayah kabupaten	254		
59.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	8		
60.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	199		
61.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	69		
62.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek	19		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	yang jadi kewenangan pengawasannya			
63.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	69		
64.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	101		
65.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wil. kabupaten	0		
66.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten	101		
67.	Jumlah badan usaha yg mendapatkan pembinaan di wil. Kab.	8		
68.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	199		
69.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.	69		
70.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	19		
71.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	19		

4. PERUMAHAN RAKYAT

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	3120	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	3120		
3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	7730		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	50		
6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	50		
7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	50		
9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
10.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
11.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
12.	Jumlah rumah tangga penerima keg.layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
13.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
14.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	26321		
15.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0		
16.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	0		
17.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	103		
18.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0		
19.	Jumlah rumah di kab/kota	59173		
20.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	103		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
21.	Jumlah rumah tidak layak huni	26321		
22.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0		Belum pernah dilakukan pendataan terhadap rumah yang tidak dihuni
23.	Rasio rumah dan KK	1,42		
24.	Jumlah rumah pembangunan baru	0		
25.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	438		
26.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	3766		
27.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	41421		
28.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	62217		
29.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0		Tidak terdapat Perumahan yang terfasilitasi RTNH
30.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJJ	0		Pemasangan PJJ merupakan kewenangan PLN
31.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
32.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	2		
33.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	2		

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1262	Satpolpp	
2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	21		Belum terdapat Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan
3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3		
4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	0		Sampai dengan tahun 2021 belum ada Pol PP yang memiliki sertifikat PPNS
5.	Tersedianya SOP dlm penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	8		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	1		
7.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%		
9.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0		
10.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0		
11.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,1%		
12.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,09%		
13.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0		
14.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,08%		
15.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0		
16.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100		
17.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%		
18.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%		
19.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	52		
20.	Tersedianya pos sektor damkar yg dilengkapi sarana prasarana damkar dan penyelamatan di kantor kecamatan	0		
21.	Tersedianya aparatur selama 24 jam yg dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
22.	Pos Damkar yang dilengkapi dgn sarpras damkar, penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0		
23.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	495		
24.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yg memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0		
27.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau PD yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	210		
28.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	6		

6. URUSAN SOSIAL

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	164	Dinas Sosial P3A dan P2KB	
2.	Jumlah data penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0		tidak terdapat Disabilitas, anak dan lanjut usia terlantar
3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1		
4.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang dijangkau	0		
5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1		
6.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0		
7.	Jumlah rumah singgah/shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1		
8.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang menerima paket sandang	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
9.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0		
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0		Belum tersedia alat bantu pada rumah singgah
11.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0		Pada Dinas Sosial P3A P2KB Belum tersedia paket kesehatan untuk perbekalan
12.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0		
13.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0		belum disediakan tenaga kesehatan untuk rumah singgah
14.	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	67		
15.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yg mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/pusat kesejahteraan sosial	0		
16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan	0		tidak melaksanakan bimbingan sosial
17.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0		
18.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	2		
19.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0		
20.	Jumlah penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar serta gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0		
22.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	25139		
23.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	14		
24.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		tidak terdapat penampungan pengungsi milik Pemerintah Daerah
27.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		tidak terdapat kelompok rentan
28.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		tidak terdapat korban bencana yang membutuhkan pelayanan psikososial
29.	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/ relawan sosial yang tersedia	67		

7. URUSAN TENAGA KERJA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 (Ada)	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dlm rencana tenaga kerja	100,00%		
3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0		
4.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	42 %		
5.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0,00%		
6.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	8%		
7.	Persentase LPK yang terakreditasi	25 %		
8.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%		
9.	Jumlah penganggur yang dilatih	125		
10.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
11.	Persentase penyerapan lulusan	46%		
12.	Lulusan bersertifikat kompetensi	0%		
13.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan peaihan	0		
14.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0		
15.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100%		
16.	Data tingkat produktivitas total	-	BPS	
17.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	61 %		
18.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	33%		
19.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	11		
20.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	32 %		
21.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	37%		
22.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1 %		
23.	Jumlah mogok kerja	0		Pada Tahun 2021 tidak terjadi Pemogokan Kerja
24.	Jumlah penutupan perusahaan	0		Pada Tahun 2021 Tidak terjadi Penutupan Perusahaan
27.	Jumlah perselisihan kepentingan	0		Pada Tahun 2021 tidak terjadi perselisihan kepentingan
28.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		Pada Tahun 2021 tidak terjadi perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Buruh dan Perusahaan
29.	Jumlah perselisihan PHK	3		
30.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	776		
31.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	4		
32.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kab./kota yg diberdayakan	Tidak ada		
33.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	75 %		
34.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	255		
35.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	336		
36.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	3		
37.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab./kota	0		
38.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0		Tidak terdapat Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
39.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		Tidak terdapat Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten
40.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	2		
41.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	5		
42.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
43.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yg terdata	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
44.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
45.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yg mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
46.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		tidak terdapat Calon Pekerja Migran/Calon TKI
47.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0		

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kab./kota yg telah dilatih PUG	0	Dinas Sosial, P3A, PP dan KB	
2.	Jumlah program/kegiatan PUG pada PD yg sudah dievaluasi melalui analisis gender di tk. Kab./kota	0		
3.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0		
4.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0		
5.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00%		
6.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0		
7.	Jumlah lembaga layanan anak yg mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota	0		
8.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yg bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab./kota yg mendapatkan pelatihan	0		
9.	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0		
10.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
11.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0		
12.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0		
13.	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	0		
14.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00%		

9. URUSAN PANGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1		
2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak ada		
3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada		
4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	2		
5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1		
6.	Tertanganinya kerawanan pangan	0		
7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1		
8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1		

10. URUSAN PERTANAHAN



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	3	Bagian Pertanahan dan BPN	sejak tahun 2018, izin lokasi diterbitkan OSS (pusat)
2.	SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan	0		
3.	Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0		
4.	SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0		
5.	Dokumen Izin membuka tanah	0		
6.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0		

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Hasil perhitungan provinsi terhadap a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKD) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	75,28 89,07 89,13	Dinas Lingkungan Hidup	
2.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota :	1		
3.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pem.kab./kota	7		
4.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab./Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemkab.kota	2		
5.	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	7		
6.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		Tidak ada Kegiatan Pelatihan bagi MHA dan Lembaga Masyarakat
7.	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemkab./kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kab./kota yang ditangani	0		



12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Penerbitan akta perkawinan	21.984	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.	Penerbitan akta perceraian	56		
3.	Penerbitan akta kematian	2272		
4.	Penyajian data kependudukan	3		

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	9		Pada Tahun 2020 Tidak terdapat fasilitas kerjasama antar Desa
2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	9		Hanya terdapat 3 Desa pada tahun 2019 yang melaksanakan kerjasama antar Desa
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yg terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	59		
4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	89		

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	0	Dinas Sosial, P3A, P2 dan KB	Pada Tahun 2020 belum terdapat Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan
2.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	0		
3.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	41,25		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	0.38%		
5.	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	557		
6.	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	5%		
7.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	82%		
8.	Pemerintah Daerah Kab./Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	39		
9.	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	95.09%		
10.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	100%		
11.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	37.66%		

15. URUSAN PERHUBUNGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100,00%	Dinas Perhubungan	
2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	419%		
3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0		Belum ada Perda/Perbup tentang Tarif Angkutan
4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	72%		

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan	0,00%	Dinas Kominfo dan statistik	Tidak terdapat Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Intra



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	yang disediakan oleh Dinas Kominfo			Pemerintah atau yang menggunakan akses internet yang diamankan oleh Dinas Kominfo
2.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	0		
3.	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dgn memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0		
4.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	0		
5.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	64%		
6.	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplemen-tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yg ditetapkan se-suai dgn ketentuan per-UU-an	20%		
7.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yg tercantum dalam dokumen proses bisnis yg telah diimplementasikan secara elektronik	75		
9.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	6,25		
10.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	62,5%		
11.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yg terintegrasi dgn sistem penghubung layanan pemerintah	20		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
12.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0		
13.	Persentase PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0		
14.	Persentase PD yg memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0%		
15.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	0		
16.	Persentase PD yg mengimplementasi inovasi yg mendukung smart city	0,00%		
17.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	44,44%		
18.	Tersedianya Perda atau Perkada terkait implementasi e-government	2		
19.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis Pem.Prov. yg menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan Pem.Kab.	14%		
20.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	3,03%		
21.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	60%		

17. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam utk koperasi dgn wil. keanggotaan dlm kab./kota	0%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		
3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	32,26%		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya utk koperasi dgn wil. keanggotaan dlm daerah kab./kota	71,43%		
5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25,81%		
6.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian utk koperasi dgn wil. keanggotaan dlm daerah kab./kota	4,22%		
7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian utk koperasi dgn wil. keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25,81%		
8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	tidak ada		
9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dlm daerah kab. /kota	31,18%		
10.	Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dlm daerah kab./kota	0		
11.	Persentase yg diberikan dukungan fasilitasi pemasaran utk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16,13%		
12.	Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		
13.	Persentase koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dgn wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16,13%		
14.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	11,72%		
15.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	14,55%		
16.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0		
17.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi dan sertifikasi produk usaha standarisasi	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
18.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0		
19.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	80		
20.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0		

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Belum ada PERDA tentang pemberian fasilitas/intensif penanaman modal
2.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		Belum ada SOP tentang pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal
3.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		Belum ada pemberian fasilitas/intensif penanaman modal
4.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1		
5.	Kegiatan pameran penanaman modal	0		
6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0		
7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	24		
8.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	637		OSS (UMK 567 Izin, Non UMK 130) dan Sicantik 498
9.	Laporan realisasi penanaman modal	404.39 M		
10.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	0		
11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	1		
12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	31		

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		
3.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesuka-relawanan dan kepeloporan pemuda	0		
4.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		
5.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	116		
6.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0		Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah tidak melaksanakan event Olah Raga Prestasi tingkat daerah dikarenakan Pandemi Covid-19

20. URUSAN STATISTIK

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tersedianya buku profil daerah	Tidak	Dinas Kominfo dan statistik	Belum terdapat Buku Profil Daerah
2.	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	tidak		Belum pernah dilaksanakan survey statistik sektoral
3.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	341		
4.	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0		Belum Pernah dilaksanakan survey statistik sektoral
5.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0		
6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	54%		
7.	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0%		



21. URUSAN PERSANDIAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0		
2.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah	6		
3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0		
4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0		

22. URUSAN KEBUDAYAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman)	13		
3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yg dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	13		
4.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yg dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	13		Pada tahun 2020 tidak terdapat kegiatan peningkatan kapasitas bagi penjaga situs
5.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	1		
6.	Perlindungan cagar budaya kab./kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1		
7.	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	tidak ada		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
8.	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	40		
9.	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	13		
10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	tidak ada		Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki museum
11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	tidak ada		
12.	Peningkatan akses masyarakat dlm pengelolaan sarana dan prasarana museum dan pelaksanaan kegiatan museum Kabupaten / Kota	tidak ada		
13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1		
14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	tidak ada		
15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	tidak ada		
16.	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	tidak ada		
17.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	tidak ada		
18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	tidak ada		
19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	tidak ada		

23. URUSAN PERPUSTAKAAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	6,7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	2,48%		
3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,002%		
4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,13%		
5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	6290		
6.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
7.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		Belum ada naskah kuno yang dialih aksara dan bahasa
8.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0		

24. URUSAN KEARSIPAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%		
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%		
4.	Persentase jumlah arsip yg dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0		
5.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada		Pada Tahun 2021 tidak dilaksanakan Pemusnahan Arsip akibat bencana sesuai NSPK
6.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Tidak Ada		
7.	Penyelamatan arsip PD Kab./Kota yg digabung dan/ dibubarkan dan pemekaran daerah/kecamatan/ kelurahan/desa yang sesuai NSPK di Kabupaten	3,7		
8.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yg dikelola oleh lembaga kearsipan kab. yg sesuai NSPK	Tidak Ada		
9.	Pencarian arsip statis yg pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab. yang dinyatakan hilang dlm bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak Ada		
10.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab. yang sesuai NSPK	Tidak Ada		



25. URUSAN PERIKANAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	19	Dinas Perikanan	
2.	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100,00%		
3.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kab./kota yang diterbitkan	36		
4.	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	70		
5.	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	639.388		

26. URUSAN PARIWISATA

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	23		
2.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	10		
3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	61		
4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	41		Wisatawan Mancanegara tidak didata berdasarkan Kebangsaan
5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0		
6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	0		
7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0		
8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0		
9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%		
10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3		



27. URUSAN PERTANIAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan	100		
3.	Jumlah Penerbitan izin usaha pertanian	0		Pada Tahun 2021 tidak terdapat fasilitas izin usaha pertanian
4.	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	100,00%		
5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kabupaten	0		Pada Tahun 2021 tidak terdapat usulan izin usaha pertanian
6.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%		Bencana yg dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular

28. URUSAN PERDAGANGAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase perizinan yg diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0 0 0		
2.	Persentase penerbitan TDG	0	Dinas PTSP	
3.	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0		
4.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu utk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0		
5.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu utk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0		
6.	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu utk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0		
7.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab.	0		
8.	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0		



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
9.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	9,09		
10.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0		
11.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	263356		
12.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	20,04%		
13.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0		

29. URUSAN PERINDUSTRIAN

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
2.	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	30%		
3.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100 %		
4.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0		
5.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten	0		

30. URUSAN TRANSMIGRASI

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	20	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	20		
3.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	4		

II. 2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Hasil (*Outcome*) adalah hasil yang dicapai dalam jangka menengah, menggambarkan hasil aktual atau yang diharapkan dari barang/jasa/kegiatan/layanan yang telah dihasilkan, berupa peningkatan kuantitas/kualitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas dan atau peningkatan pendapatan. Indikator hasil dijadikan landasan untuk menilai apakah hasil yang diperoleh dalam bentuk output dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan bagi masyarakat. Berikut disampaikan capaian indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yg berpartisipasi dlm PAUD	80,67%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	84.83%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 th yg berpartisipasi dlm pendidikan menengah pertama	73.97%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	7.37%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
2.	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten	89,78	Dinas kesehatan	
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	100%		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	76,95%		
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	85,23%		
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,71 %		
		Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar	72,77%		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64,19%		
		Persentase Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	49,87%		
		Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	76,38%		
		Persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43,20%		
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,52%		
		Persentase ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	86,97%		
		Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	65,18%		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	75.87%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
3.	Pekerjaan Umum	Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten.	-	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA	
		Rasio Luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yg terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten	13,13%		
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	70,39%		
		Persentase jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	81,76%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Cipta Karya	
		Persentase jumlah Ru-mah Tangga yg memper-oleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,31%		
		Rasio Kepatuhan IMB	100%		
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	64,15%		
		Rasio tenaga Operator/ teknisi/analisis yg memiliki sertifikat Kompetensi	42,55%		
		Rasio Proyek yg menjadi kewenangan pengawas-annya tanpa kecelakaan konstruksi	95,20%		
4.	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan reha-bilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Cipta Karya	
		Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	0		Pada Tahun 2021 tidak terdapat relokasi yang dikarenakan Program Pemerintah



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten yang ditangani	0		
		Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	44.48%		
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0,74		
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	persentase gangguan Tantribum yang diselesaikan	100,00%		
		Persentase PERDA dan PERKADA yg ditegakkan	27,27%		
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	664		
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	664		
		jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0		
		persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00%		
		waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100		
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlanjar dan gepeng yg terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab.	100%		
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yg mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3709897.436		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Persentase perusahaan yg menerapkan tatakelola kerja yg layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar peserta BPJS Ketenaga-kerjaan)	6,56		
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	75,89%		
8.	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,01%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,009%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,32		
9.	Pangan	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dgn peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah	
		Persentase Penetapan tanah utk pembangunan fasilitas umum	0		
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0		
		Tersedianya Tanah Obyek landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absentee	0		Pada tahun 2021 tidak tersedia data tanah untuk penanaman modal, tanah untuk Obyek Landreform dan tanah untuk masyarakat
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0		
		Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0		Pada tahun 2021 tidak terdapat sengketa tanah garapan
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	72,58		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	18,37%		
		Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau keg. thd izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	0		Tidak Ada Pelanggaran
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	99.94 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	55.18 %		
		Kepemilikan akta kelahiran	81.08%		
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	34.62 %		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	62,79%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	83,70%		
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	TFR (angka kelahiran total)	1,88	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	80.78%		
		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	17,57%		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten	97.10 %	Dinas Perhubungan	
		V/C Ratio Jalan Kabupaten	0		Belum memiliki tenaga teknis yang mampu menghitung V/C Ratio
16	Komunikasi Dan Informatika	persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yg disediakan oleh Dinas Kominfo	2 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	14.29 %		
		persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	8,85%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pem.Kab.			
17	Koperasi Usaha Kecil Menengah	peningkatan koperasi yang berkualitas	36.56%	Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah	
		meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	19,56%		
18	Penanaman Modal	persentase peningkatan investasi di Kabupaten	27.04 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Kepemudaan Dan Olahraga	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,14%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,08%		
		peningkatan prestasi olahraga	25		Tahun 2020 Tidak ada Event Olahraga dikarenakan Pandemi Covid-19
20	Statistik	persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dlm menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dlm melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00%		
21	Persandian	tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten	0	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Tidak melaksanakan kegiatan persandian
22	Kebudayaan	tingkat pelestarian cagar budaya	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Belum terdapat data
		indeks pembangunan literasi masyarakat	0		Belum terdapat data
24	Kearsipan	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah dan pertanggung	75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		jawaban nasional (Psl. 40 dan Psl. 59 UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)			
		tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	75		Belum terdapat data
25	Kelautan Dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kab./Kota di wil.Provinsi (sumber data : one data KKP)	61151.71	One Data KKP	
26	Pariwisata	persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara per kebangsaan	-98,25%	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	
		Persentase peningkatan wisatawan nusantara yg datang ke Kabupaten	-22,93%		
		tingkat hunian akomodasi	15,01%		Berdasarkan data tingkat Hunian akomodasi Disporapar Bidang Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Jumlah kamar tersedia dan kamar terjual sebesar 015.007
		kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kab. (harga berlaku)	189.280.000		dalam jutaan rupiah
		kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kab. (harga berlaku)	1.448.439.561		Diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pada LRA APBD tahun 2021



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
27	Pertanian	produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,36%	Dinas Pertanian dan Pangan	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun berdasarkan Data ATAP Prov. Kalbar sebesar 29,02 kw/ha dengan perhitungan Jumlah produksi pertanian pangan per tahun dibagi luas panen (tanpa dibagi perhektar pertahun dan dikali 100%)
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	77,15%		Peningkatan kejadian penyakit/kasus pada tahun 2021 karena terjadi wabah virus African Swine Fever (ASF) yang menyerang hewan Babi yang mana tingkat kematiannya hingga 100%. selain itu juga penyakit rabies yang masih ada terjadi di Kapuas Hulu.
28	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	19,56%	Dinas Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	271,96%		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	20,04%		
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	5,72%	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	30%	dan Transmigrasi	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	51,28%	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yg dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dgn jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yg lokasinya di daerah Kabupaten	0		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100		

II. 3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1.	Perencanaan Dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	10.00%	Badan Keuangan Daerah	
		Rasio PAD	747.01%	Badan Keuangan Daerah	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Inspektorat Kabupaten	
		peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat Kabupaten	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	51.45%	Badan Keuangan Daerah	
		Opini Laporan Keuangan	100	Inspektorat Kabupaten	



NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
2.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yg dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
		Persentase jumlah pengadaan yg dilakukan dgn Metode Kompetitif	2,19 %		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	97.55%		
3.	Kepegawaian	Rasio PNS Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar(%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	140.14%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rasio PNS Fungsional (%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25.29%		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi(%) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27,64%		
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	99.83%	Badan Keuangan Daerah	Tidak Terjadi Deviasi
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	103.22%		Tidak Terjadi Deviasi
		Assets Management : 1. Apakah ada Daftar Aset tetap?	Ada		
		2. Apakah ada manual utk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	Ada		
		3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)	Ada		
		4. Apakah nilai asset tercantum dlm laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ada		
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	5,84%		
5	Transparansi Dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	105.897%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		akses publik terhadap informasi keuangan daerah	13.21%		



III. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

III. 1. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari Bupati Kapuas Hulu kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen dan kesepakatan antara Bupati Kapuas Hulu dengan para Kepala Perangkat Daerah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yg disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi juga termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja tersebut memuat indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tiap-tiap sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. IKU tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. Adapun Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 ditetapkan sebagaimana tabel berikut:



Tabel. 2.3.

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	1. Predikat SAKIP	BB
	2. Opini BPK	WTP
	3. Nilai LPPD	3,7800
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	72
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian (%)	6,81%
	6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)	6,06%
	7. PDRB Per Kapita	Rp 25.200.000
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kapuas Hulu	8. Jumlah Kunjungan Wisatawan	15.650 Orang
5. Menurunnya angka kemiskinan	9. Angka Kemiskinan	9,37%
6. Menurunnya pengangguran masyarakat	10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,17%
7. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	11. Angka Harapan Hidup (AHH)	72 Tahun
8. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	12. Angka Rata-Rata lama sekolah	7,28 Tahun
	13. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,06 Tahun
	14. Rata-rata nilai UN	65
9. Meningkatnya kemandirian desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat	15. Jumlah Desa Mandiri	4
10. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	16. Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	73,54%
	17. Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,008%
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021, berdasarkan target perjanjian kinerja pada tahun 2021, maka perlu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara target perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel. 2.4.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata
1. Predikat SAKIP	BB	-	-	-
2. Opini BPK	WTP	-	-	
3. Nilai LPPD	3,7800	-	-	
4. Indeks Kepuasan Masyarakat	72	81,46	113,14%	113,14%
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian (%)	6,81%	2,34%	34,36%	66,33%
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)	6,06%	3,82%	63,04%	
7. PDRB Per Kapita	Rp 25.200.000	Rp 25.600.000	101,59%	
8. Jumlah Kunjungan Wisatawan	15.650 Orang	8.842 Orang	56,50%	56,50%
9. Angka Kemiskinan	9,37%	8,93%	104,70%	104,70%
10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,17%	4,18%	7,37%	7,37%
11. Angka Harapan Hidup (AHH)	72 Tahun	72,53 Tahun	100,74%	100,74%
12. Angka Rata-Rata lama sekolah	7,28 Tahun	7,53 Tahun	103,43%	107,05%
13. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,06 Tahun	12,08 Tahun	100,17%	
14. Rata-rata nilai UN (SD)	65	76,41	117,55%	
15. Jumlah Desa Mandiri	4	21	525%	525%
16. Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	73,54%	64,15%	87,23%	8.481,12%
17. Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,008%	1,35%	16.875%	
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	75,28	100,37%	100,37%

III. 3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai target kinerja sasaran sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berikut disampaikan perbandingan hasil capaian indikator kinerja tahun 2020 dan tahun 2021.



Tabel. 2.5.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Progres
1. Predikat SAKIP	BB	B	-	-
2. Opini BPK	WTP	-	-	-
3. Nilai LPPD	3,7800	-	-	-
4. Indeks Kepuasan Masyarakat	72	80,30	81,46	1,44%
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian (%)	6,81%	2,12%	2,34%	10,38%
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)	6,06%	0,77%	3,82%	396,10%
7. PDRB Per Kapita	Rp 25.200.000	Rp.23.330.000	Rp 25.600.000	9,73%
8. Jumlah Kunjungan Wisatawan	15.650 Orang	8.687 orang	8.842 Orang	1,78%
9. Angka Kemiskinan	9,37%	8,33%	8,93%	7,20%
10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,17%	4,02%	4,18%	3,98%
11. Angka Harapan Hidup (AHH)	72 Tahun	72,52 Tahun	72,53 Tahun	0,01%
12. Angka Rata-Rata lama sekolah	7,28 Tahun	7,52 Tahun	7,53 Tahun	0,13%
13. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,06 Tahun	12,05 Tahun	12,08 Tahun	0,25%
14. Rata-rata nilai UN (SD)	65	70,66	76,41	8,14%
15. Jumlah Desa Mandiri	4	19	21	10,53%
16. Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	73,54%	61,35%	64,15%	4,56%
17. Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,008%	1,34%	1,35%	0,75%
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	72,65	75,28	3,62%

III.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

Target Kinerja Indikator Sasaran ditetapkan dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya selama tahun berjalan, setiap tahunnya ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan



kegiatan sebagai upaya untuk mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibandingkan dengan target dalam RPJMD.

Tabel. 2.6.

Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan RPJMD

Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1. Predikat SAKIP	BB	-	-
2. Opini BPK	WTP	-	-
3. Nilai LPPD	3,300	-	-
4. Indeks Kepuasan Masyarakat	72	81,46	113,14%
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian (%)	6,81%	2,34	34,36%
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)	6,06%	3,82	63,04%
7. PDRB Per Kapita	-	Rp 25.600.000	-
8. Jumlah Kunjungan Wisatawan	15.650 Orang	8.842 Orang	56,50%
9. Angka Kemiskinan	7%	8,93%	72,43%
10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,92%	4,18%	-17,71%
11. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,99 Tahun	72,53 Tahun	100,75%
12. Angka Rata-Rata lama sekolah	6,75 Tahun	7,53 Tahun	111,56%
13. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	8,5 Tahun	12,08 Tahun	142,12%
14. Rata-rata nilai UN (SD)	68	76,41	112,37%
15. Jumlah Desa Mandiri	26	21	80,77%
16. Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	73,54%	64,15%	87,23%
17. Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	3,21%	1,35%	42,06%
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	75,28	100,37%



III. 5. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Untuk dapat mencapai target kinerja indikator sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, dilaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut disampaikan analisa efisiensi penggunaan sumber daya yang dikaitkan dengan kinerja yang telah dicapai.



Tabel. 2.7.

Realisasi Kinerja Sasaran dan Keuangan

Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%tase	
1. Predikat SAKIP	BB	B	75%				
2. Opini BPK	WTP	-	-				
3. Nilai LPPD	3,7800	-	-				
4. Indeks Kepuasan Masyarakat	72	81,46	113,14%				
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian (%)	6,81%	2,34%	34,36%	47.241.839.267,00	43.139.952.606,00	91,32	-56,96
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%)	6,06%	3,82%	63,04%	14.312.487.751,00	13.919.719.339,00	97,26	-34,22
7. PDRB Per Kapita	Rp 25.200.000	Rp 25.600.000	101,59%	-	-		
8. Jumlah Kunjungan Wisatawan	15.650 Orang	8.842 Orang	56,50%	8.753.641.397,00	8.660.478.541,00	98,94	-42,44
9. Angka Kemiskinan	9,37%	8,93%	104,70%	-	-		
10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,17%	4,18%	7,37%	8.753.641.397,00	8.660.478.541,00	98,94	-91,57
11. Angka Harapan Hidup (AHH)	72 Tahun	72,53 Tahun	100,74%	342.477.807.762,42	324.758.748.994,63	94,83	5,91
12. Angka Rata-Rata lama sekolah	7,28 Tahun	7,53 Tahun	103,43%	403.547.058.357,00	331.029.577.345,00	82,03	25,02
13. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,06 Tahun	12,08 Tahun	100,17%				
14. Rata-rata nilai UN (SD)	65	76,41	117,55%				
15. Jumlah Desa Mandiri	4	21	525%	15.325.141.237,00	14.201.377.808,22	92,67	432,33
16. Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	73,54%	64,15%	87,23%	110.614.971.582,00	110.189.974.940,00	99,62	-12,38
17. Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,008%	1,35%	16.875%	11.748.176.454,00	11.693.077.353,14	99,53	16.775,47
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	75,28	100,37%	10.145.487.513,00	10.038.358.686,00	98,94	1,43



III.6. Analisa Program dan Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja

Untuk mendapatkan capaian kinerja sesuai target, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 telah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang memuat program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut disampaikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran sebagaimana tabel 2.8.



Tabel 2.8.
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Penanggungjawab
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	1. Predikat SAKIP 2. Opini BPK 3. Nilai LPPD	1. Petautan Organisasi Dan Reformasi Birokrasi	1. Anjab	Sekretariat Daerah
			2. Penyusunan Laporan Kinerja	
			3. Pembinaan peningkatan pelayanan publik	
			4. Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi	
			5. Optimalisasi TUPOKSI OPD	
			6. Penataan ketatalaksanaan	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Penataan Administrasi Kependudukan	7. Percepatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			8. Inovasi dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	
		3. Program Jaminan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	9. Penyediaan Jasa Perekaman KTP- Elektronik, Penerbitan KTP/KK dan Pendistribusian	
			10. Pelayanan Penerbitan KIA	
		4. Peningkatan Akses Dan Kualitas Informasi Publik	11. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik
			12. Penyediaan Layanan Informasi Publik	
		5. Aplikasi Informatika	13. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik dan Daring	Dinas Komunikasi Informasi Dan Statistik
			14. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	
			15. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) Kab. Kapuas Hulu	
			16. Pengelolaan dan pengembangan Website Kabupaten Kapuas Hulu	



Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Penanggungjawab
		6 Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	17 Pengelolaan Opini dan Aspirasi Masyarakat Melalui Sistem Informasi Layanan Publik	Dinas Penataan Ruang Dan Cipta Karya
		7 Pembangunan Gedung Kantor Dan Fasilitas Umum	18 Peningkatan dan Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum	
		8 Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan	19 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 20 Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian (%) 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan (%) 3. PDRB per kapita	9 Peningkatan Produksi Pertanian	21 Pengembangan Tanaman Pangan	Dinas Pertanian Dan Pangan
			22 Pengembangan Tanaman Hortikultura	
		10 Program Pemberdayaan Penyuluhan	23 Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Kelompok	Dinas Pertanian Dan Pangan
			24 Pembinaan Kelembagaan Tani	
		11 Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	25 Pemulihan Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan
			26 Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
		12 Program Pengembangan Sistem Logistik Ikan Daerah	27 Implementasi Sistem Logistik Ikan Daerah (SLID)	
			28 Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	13 Standarisasi Pelayanan Kesehatan	29 Akreditasi Puskesmas	Dinas Kesehatan
		14 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya	30 Peningkatan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar	



Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Penanggungjawab
		15 Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan Terutama Bagi Masyarakat Miskin	31 Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda	
		16 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	32 Peningkatan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	
Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	17 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	33 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Pemula	Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan
		18 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	34 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	
		19 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	35 Promosi Produk Expo Daerah	
		20 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	36 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP, Kopdit/CU, dan KJKS/UJKS	
		21 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	37 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Produktif	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi
			38 Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya)	
		22 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	39 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Pelaku IKM	
			40 Fasilitasi Pengujian Produk Pangan	
		23 Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	41 Penyelenggaraan pameran investasi daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Penanggungjawab
Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	24 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	42 Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			43 Sosialisasi Penguatan POKJA PUG dan Focal Point	
		25 Perlindungan Dan Jaminan Sosial	44 Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/Orang Terlantar	
			45 Penyediaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	
			46 Mobilisasi dan Pendistribusian bantuan sosial	
		26 Rehabilitasi Sosial	47 Pelayanan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	
			48 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar	
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	1. Angka rata-rata lama sekolah 2. Angka harapan lama sekolah 3. Rata-rata nilai UN	27 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	49 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			50 Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar	
			51 Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMP	
			52 Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah SD/MI dan Ujian Nasional SMP/MTs	
		28 Pendidikan Non Formal	53 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			54 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional	
			55 Pembinaan bagi Lembaga Kursus dan Pendidikan Non formal dan Formal	
			56 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)	
	Jumlah Desa Mandiri	29	57 Fasilitasi Pembentukan BUMdes	



Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Penanggungjawab
Meningkatnya ke- mandirian desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat		Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	58 Pelatihan Manajemen BUMdes	Dinas Pemberdaya-an Masyarakat Dan Desa
			59 Pembinaan Pelayanan Sosial Dasar	
		30 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	60 Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	
			61 Pembinaan peningkatan status kemandirian desa	
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1. Persentase jalan dlm kondisi mantap 2. Persentase lingkungan pemukiman kumuh	31 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan	62 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan	Dinas PU, Bina Marga Dan Sumber Daya Air
		32 Pembangunan Jalan Dan Jembatan	63 Pembangunan jalan kabupaten	
			64 Peningkatan Jembatan	
		33 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan	65 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan	Dinas Penataan Ruang Dan Cipta Karya
		34 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	66 Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Desa, Gertak Kayu dan Jembatan Gantung	Dinas Perhubungan
			67 Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	
Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35 Program Peningkatan Kualitas Perumahan	68 Bantuan Sosial Rumah Swadaya	
		36 Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum Dan Air Limbah	69 Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi (IPAL)	Dinas Penataan Ruang Dan Cipta Karya
			70 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Penyehatan Lingkungan	
Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kab.Kapuas Hulu	Jumlah Kunjungan Wisatawan	37 Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	71 Pemantauan Kualitas Lingkungan	Dinas LH, PERKIM
		38 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	72 Pelaksanaan Promosi Pemasaran Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		39 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	73 Pengembangan objek pariwisata unggulan	
			74 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	
			75 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	



Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan		Penanggungjawab
		40 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	76	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Pengembangan Kemitraan Pariwisata	
			77	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	
			78	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada daerah/kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak mendapatkan Tugas Pembantuan baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah berupa pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021. DAK tersebut digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 309.580.191.213,00.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. Pendidikan

I. 1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang pendidikan terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

I. 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :



Tabel 4.1.

Target dan Indikator SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	persentase jumlah anak Usia 5 sampai 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100 %
2.	Pendidikan Dasar	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	100 %

I. 3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Komponen	Volume	Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	persentase jumlah anak Usia 5 sampai 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	7.439	80,66
			jumlah penduduk usia 5-6 tahun Kabupaten /Kota	9.222	
2.	Pendidikan Dasar	persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	persentase jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	25.029	84,83
			jumlah penduduk usia 7-12 tahun Kabupaten /Kota	29.505	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Komponen	Volume	Capaian
3.	Pendidikan Kesenjangan	persentase Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan;	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	969	7,36
			jumlah penduduk usia 7-18 tahun Kabupaten /Kota	13.152	

Dari tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pada tahun 2021 Capaian Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 80,66%. Hal ini disebabkan karena data anak usia dini yang sudah tamat dan sedang belajar pada PAUD yang diselenggarakan dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pada tahun 2021 Capaian Pelayanan Pendidikan Dasar adalah sebesar 84,83%. Hal ini disebabkan karena tidak semua siswa SD yang sudah tamat SD melanjutkan pendidikannya ke SMP.
- Pada tahun 2021 Capaian Pelayanan Pendidikan Kesenjangan adalah sebesar 7,36%. Hal ini disebabkan karena pendidikan kesetaraan belum menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, mengingat wilayah yang sangat luas.

I. 4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Untuk mendukung upaya pemenuhan SPM, pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan rincian alokasi dan realisasi



anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Pendidikan

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
A.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	109.689.154.508,00	106.921.078.111,71	97,48
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.300.000.000,00	1.144.672.114,00	88,05
2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	242.996.700,00	230.098.544,00	94,69
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.939.000.000,00	1.863.101.828,00	96,09
4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	7.011.245.579,00	6.557.287.126,00	93,53
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.110.620.000,00	1.108.969.155,00	99,85
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	870.000.000,00	868.729.546,00	99,85
7	Pengadaan Mebel Sekolah	460.274.402,00	-	-
8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.921.815.500,00	1.903.565.000,00	99,05
9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	40.919.600,00	40.437.400,00	98,82
10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	251.892.100,00	251.888.100,00	100,00
11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	58.460.100,00	57.126.500,00	97,72
12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.723.816.500,00	8.708.216.500,00	99,82
13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.119.391.900,00	1.113.750.198,00	99,50
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.175.339.785,00	-	-
15	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.318.472.000,00	2.177.808.634,00	93,93
16	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.552.033.500,00	1.404.583.875,00	90,50
17	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	431.807.000,00	338.795.411,00	78,46
18	Pembangunan Laboratorium	621.544.650,00	597.460.845,00	96,13
19	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	915.204.000,00	867.862.175,00	94,83
20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.512.839.000,00	1.429.443.134,00	94,49
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.002.157.000,00	4.375.354.271,00	87,47
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	360.464.000,00	315.092.581,00	87,41
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.150.109.000,00	967.799.098,00	84,15
24	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	871.000.000,00	859.884.200,00	98,72
25	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	230.076.000,00	223.540.800,00	97,16



No	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
26	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	84.952.000,00	81.300.700,00	95,70
27	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.711.756.600,00	6.680.556.600,00	99,54
28	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	178.509.100,00	176.469.800,00	98,86
29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.934.244.917,00	57.386.095.120,71	338,88
30	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	86.758.750,00	86.112.098,00	99,25
31	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	224.971.850,00	224.645.765,00	99,86
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	426.761.975,00	399.157.965,00	93,53
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	13.744.600,00	12.722.233,00	92,56
34	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	253.064.000,00	242.351.595,00	95,77
35	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	12.320.000,00	11.490.000,00	93,26
36	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	969.147.000,00	969.147.000,00	100,00
37	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	89.555.500,00	89.063.000,00	99,45
38	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.420.569.000,00	2.420.179.000,00	99,98
39	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	75.056.400,00	73.180.700,00	97,50
40	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	92.983.000,00	92.513.000,00	99,49
41	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	923.281.500,00	570.626.500,00	61,80
B.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	193.484.800,00	186.978.600,00	96,64
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	163.073.200,00	158.067.000,00	96,93
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.411.600,00	28.911.600,00	95,07

I. 5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur baik PNS maupun tenaga kontrak sebagai berikut :



Tabel 4.4.
Data Personil SPM Bidang Pendidikan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	GURU	
	a. TK/PAUD	44 orang
	b. SD	1.571 orang
	c. SMP	493 orang
2	a.KESETARAAN	100 orang
3	PENGAWAS	45 orang
4	PENILIK	2 orang
5	TENAGA KEPENDIDIKAN/PENUNJANG	157 orang
6	PEJABAT STRUKTURAL	9 orang
7	FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA	40 orang
8	JABATAN FUNGSIONAL	9
JUMLAH		2.471 orang

I. 6. Permasalahan dan Solusi



Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Secara geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu cukup luas dan memiliki 23 Kecamatan.
- b. Secara akses infrastruktur jalan masih minim dan masih ada wilayah yang belum terakses oleh jalan yang baik.
- c. Sumber dana pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kemampuan keuangan bersumber dari APBD belum dapat secara optimal / terbatas
- d. Sumber daya aparatur terbatas.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya dana dan SDM.
- b. Meningkatkan sarana infrastruktur.
- c. Program berkelanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan.
- d. Sistem rekrutmen pegawai khususnya guru/pendidik minimal pendidikan S-1/ D-4.
- e. Penguatan sistem pengendalian, pengawasan di satuan pendidikan melalui petugas pengawas / penilik.

II. Kesehatan

II. 1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Standar Minimal Bidang Kesehatan



disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang kesehatan terdiri atas :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil,
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin,
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir,
- d. pelayanan kesehatan balita,
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif,
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut,
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi,
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus,
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat,
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

II. 2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Target dan Indikator SPM Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%



NO	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Persentase penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%

II. 3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :



Tabel 4.6.
Capaian SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kab./ kota dalam kurun waktu satu tahun	3.471	76,94%
			Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kab.kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	4.511	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Jml Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah kerja kab./ kota dlm kurun waktu satu tahun	3.670	85,23%
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kab./kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	4.306	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dg standar dlm kurun waktu satu tahun	3.906	96,70%
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	4.039	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah balita usia 0-5 bulan yg mendapat-kan pelayanan kese-hatan sesuai standar di wil. kerja kab./kota dalam kurun waktu satu tahun	13.391	72,76%
			Jumlah orang usia 0-5 tahun yang ada di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	18.402	



No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun ajaran	28.318	64.19%
			Jumlah orang usia 7-15 tahun yang ada di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yg sama	44.116	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yg mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun	85.871	49,86%
			Jumlah orang usia 15-59 th yg ada di wil. kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun yang sama	172.194	
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal satu kali di wil. kerja kab./kota dalam kurun waktu satu tahun	15.565	76,37%
			Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang ada di wil. kerja kab./ kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	20.379	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas di wil. kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dlm kurun waktu satu tahun	29.949	43,2%



No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang berada di dlm wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam waktu satu tahun yang sama	69.326	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase jumlah penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas di wil. kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.930	94,51%
			Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.100	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ODGJ berat di wil.kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	474	86,97%
			Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wil.kerja kab./kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun yang sama	545	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	2.005	65.18%
			Jumlah orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.076	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wil.kerja kab./kota yang mendapatkan	4.167	75,87%



No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
		pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun		
			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wil.kerja kab./kota dlm kurun waktu satu tahun	5.492	

- a. Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil adalah sebesar 76,94%, tidak optimalnya capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ini disebabkan karena sasaran ibu hamil ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil ibu hamil pada tahun 2021.
- b. Capaian pelayanan kesehatan Ibu Bersalin adalah sebesar 85,23%, tidak optimalnya capaian ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ini disebabkan karena sasaran ibu bersalin ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari BPS, sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil ibu bersalin pada tahun 2021
- c. Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah sebesar 96,70%. Hal ini disebabkan karena sasaran bayi baru lahir ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihitung dengan menggunakan data proyeksi penduduk dari BPS, mendekati data riil jumlah bayi baru lahir tahun 2021
- d. Capaian pelayanan kesehatan balita adalah sebesar 72,76%, tidak optimalnya pelayanan kesehatan balita disebabkan karena sebagian besar balita tidak datang lagi ke posyandu/fasilitas kesehatan setelah berusia 12 bulan
- e. Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 64.19%, capaian ini dikarenakan adanya kondisi pandemi



covid-19 yang mengakibatkan aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara dan tidak seluruh sekolah memberikan ijin untuk dilakukan pelayanan kesehatan bagi peserta didik di sekolah untuk meminimalisir penularan covid-19

- f. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah sebesar 49,86%, tidak optimalnya pelayanan pada usia produktif disebabkan karena tidak semua penduduk usia produktif melakukan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan
- g. Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 76,37%, hal ini karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan tidak semua penduduk usia lanjut mendatangi posyandu lansia dan fasilitas kesehatan
- h. Capaian pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah sebesar 43,2%, tidak optimalnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi ini disebabkan karena sasaran penderita hipertensi ini ditetapkan berdasarkan angka prevalensi yang diperoleh dari hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun sebelumnya, sehingga sasaran yang ditetapkan lebih besar dari data riil penderita hipertensi pada tahun 2021
- i. Capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM) adalah sebesar 86,97%, ini berarti hampir seluruh penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- j. Capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat adalah sebesar 87,50%, hal ini karena tidak semua penderita ODGJ berat melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan.
- k. Capaian pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TBC) adalah sebesar 65.18%, hal ini berarti hampir semua orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- l. Capaian pelayanan kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV



adalah sebesar 75,87%, hal ini karena tidak seluruh orang dengan resiko terinfeksi HIV dapat ditemukan dan melakukan pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan.

II. 4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Kesehatan sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Kesehatan

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	124,730,026,457.00	122,622,304,808	98.31%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	457,448,000.00	395,500,280	86.46%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,190,611,178.00	84,254,532,953	98.90%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	171,400,000.00	171,073,500	99.81%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2,910,325,773.00	2,910,167,776	99.99%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	529,550,000.00	525,958,983	99.32%



6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,546,919,900.00	1,498,304,640	96.86%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	728,275,000.00	703,523,000	96.60%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,491,410,000.00	2,255,010,581	90.51%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,550,510,000.00	1,518,454,207	97.93%
10	Peningkatan Pelayanan BLUD	29,153,576,606.00	28,389,778,888.45	97.38%
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	193,971,339,505.00	178,641,888,031.18	92.10%
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	138,069,241,869.00	136,614,989,519	98.95%
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55,633,850,636.00	41,785,036,112	75.11%
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	162,747,000.00	140,397,400	86.27%
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105,500,000.00	101,465,000	96.18%
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	21,520,040,800.00	21,271,419,400.00	98.84%
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	7,400,000.00	4,605,000	62.23%
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	21,309,000,000.00	21,135,375,400	99.19%
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	203,640,800.00	131,439,000	64.54%
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1,126,101,000.00	1,101,649,255	97.83%
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8,700,000.00	8,350,000	95.98%
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12,000,000.00	5,655,000	47.13%
3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1,084,151,000.00	1,078,605,855	99.49%
4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	21,250,000.00	9,038,400	42.53%
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,130,300,000.00	1,121,487,500.00	99.22%
1	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,045,820,000.00	1,040,707,500	99.51%



2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84,480,000.00	80,780,000	95.62%
	JUMLAH TOTAL	342,477,807,762.00	324,758,748,994.63	94.83%

II. 5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.8.

Data Personil SPM Bidang Kesehatan

NO.	JENIS TENAGA	PNS	KONTRAK	NS	MAGANG	JUMLAH
1.	DOKTER UMUM	28	29	1	0	58
2.	DOKTER GIGI	2	2	0	0	4
3.	DOKTER SPESIALIS	5	5	0	0	10
4.	PERAWAT	304	291	13	105	713
5.	PERAWAT GIGI	27	5	0	10	42
6.	BIDAN	223	133	22	80	458
7.	PRANATA LABORATORIUM	32	14	3	1	50
8.	FARMASI	30	15	3	0	48
9.	PEREKAM MEDIS	2	10	0	2	14
10.	PENYULUH KESMAS	28	27	4	6	65
11.	APOTEKER	10	9	2	1	22
12.	FISIOTERAPIS	4	2	0	0	6
13.	NUTRISIONIS	33	11	14	1	59
14.	RADIOGRAFER	4	4	0	0	8
15.	SANITARIAN	19	3	7	1	30
16.	TENAGA LAINNYA	110	184	0	9	303
17.	ELEKTROMEDIS	1	0	0	0	1
JUMLAH		862	744	69	216	1891



II. 6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kesenjangan antara data proyeksi dan data riil yang besar.
2. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu dinilai masih sangat lemah dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan.
3. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai.
4. Pencatatan dan laporan yang belum tertib.
5. Perekrutan SDM belum menyesuaikan kebutuhan terkait Kompetensi Peningkatan SPM.
6. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan.
7. Evaluasi SPM belum terintegrasi secara optimal.
8. Sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang belum paripurna. dan Sarana dan prasarana kesehatan dasar yang belum merata.
9. Sosialisasi Informasi Program dan Hasil Kegiatan yang belum maksimal.
10. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.
11. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada ancaman meningkatnya penyakit lain (new emerging dan re- emerging).
12. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih tidak optimal di masyarakat.
13. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.



14. Kondisi Pandemi Covid-19 yang berimbas pada berbagai hal diantaranya :

- a) Monitoring dan evaluasi tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang sdh dibuat, Monev dengan metode virtual tidak bisa dilaksanakan dengan optimal.
- b) masyarakat yang takut mendatangi atau mengunjungi Fasilitas kesehatan sehingga terjadi keterlambatan penanganan komplikasi pada ibu maupun bayi.
- c) beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- d) *refocussing* anggaran difokuskan untuk penangan covid – 19
- e) Penajaringan dan pelayanan kesehatan tidak bias dilaksanakan secara optimal.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*);
- b. Peningkatan dan Pemerataan SDM, diutamakan untuk ketersediaan 6 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga dokter, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan.
- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan masyarakat, dan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.
- d. Efisiensi pembiayaan, Pembiayaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien.
- e. Pengembangan sistem informasi kesehatan, diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian



pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

- f. Penguatan pelayanan kesehatan sekunder (rujukan).
- g. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum of Care*), melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
- h. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan, melalui program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil.
- i. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas promosi kesehatan secara berkelanjutan untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa kesehatan memerlukan peran serta dan pemberdayaan di masyarakat.
- j. Peningkatan Inovasi dalam pelayanan.
- k. Penjaringan dan pelayanan di masa pandemi berpedoman pada protokol kesehatan serta petunjuk teknis yang berlaku.

III. Pekerjaan Umum

III. 1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar yang harus diberikan Pemerintah Kabupaten pada bidang Pekerjaan umum terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

III. 2. Target Pencapaian SPM oleh daerah



Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang pekerjaan umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Target dan Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten/Kota	100 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah domestik terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %

III. 3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan perpipaan	68.658	81,76%



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
		terhadap rumah tangga di Kabupaten/Kota	terlindungi di dalam sebuah Kabupaten		
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut	83.975	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air limbah domestik terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air limbah domestik di dlm sebuah kab.	44.562	75,30%
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut	59.173	

III. 4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.13
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.269.372.586,00	4.833.518.086,00	91,73
1	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	1.496.077.844,00	1.367.441.000,00	91,40
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.773.294.742,00	3.466.077.086,00	91,86
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000.000,00	299.726.800,00	99,91



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	300.000.000,00	299.726.800,00	99,91
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	110.715.621.582,00	110.290.624.940,00	99,62
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.073.300.850,00	1.073.300.850,00	100,00
2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.230.165.000,00	1.092.667.400,00	88,82
3	Rekonstruksi Jalan	73.737.956.831,00	73.591.882.314,00	99,80
4	Pemeliharaan Berkala Jalan	9.715.202.494,00	9.706.665.828,00	99,91
5	Pembangunan Jembatan	16.142.078.007,00	16.042.078.048,00	99,38
6	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	7.211.780.800,00	7.178.892.900,00	99,54
7	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.605.137.600,00	1.605.137.600,00	100,00
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	468.928.800,00	412.465.250,00	87,96
1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	29.000.000,00	-	-
2	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	159.632.000,00	132.432.000,00	82,96
4	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	83.152.000,00	83.152.000,00	100,00
5	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	9.400.000,00	9.383.900,00	99,83
6	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	179.344.800,00	179.097.350,00	99,86
JUMLAH		116.753.922.968,00	115.836.335.076,00	99,21408

III. 5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM,
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta



Karya Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut nama jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.14
Data Personil SPM Pekerjaan Umum

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya	1
2.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya	1
3.	Kepala Bidang Jalan Desa dan jalan Lingkungan	1
4.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	1
5.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1
6.	Kepala Bidang Tata Ruang	1
7.	Kepala Sub Bagian Program	1
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	1
9.	Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakaryaan	1
10.	Jabatan Fungsional Tertentu	15
11.	Jabatan Fungsional Umum	21
JUMLAH		45

III. 6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat yang menggunakan perpipaan serta Kurangnya respon masyarakat untuk memelihara Sarana Air bersih yang ada bahkan Sering diabaikan pentingnya peran kebersihan



- b. Masih ada masyarakat yang menolak pembangunan Sanitasi (IPAL) karena ketidaktahuan fungsinya bahkan Adanya keberatan atas pembangunan yang harus melewati tanah masyarakat.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Adanya pembinaan dan sosialisasi dari Dinas terkait pemeliharaan saran dan prasarana air bersih.
- b. Adanya pembinaan dan sosialisasi dari terkait pemeliharaan saran dan prasarana sanitasi.

IV. Perumahan Rakyat

IV. 1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa SPM bidang perumahan rakyat terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena rekolasi program.

IV. 2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan



Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.15.
Target dan Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang terkena relokasi yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

IV. 3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.16.
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di wilayah kerja kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Jumlah rumah korban bencana yg di tangani sesuai standar di wil. kerja Kab./Kota dlm kurun waktu 1 tahun	50	100%
			Jumlah total rencana rumah korban yang akan ditangani di wil. kerja dlm Kab./Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	50	



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Capaian
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang terkena relokasi yang mendapatkan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah total rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah atau bangunan	0	0%
			rumah tangga penerima subsidi uang sewa	0	
			rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0	

Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota adalah sebesar 0 %, Capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat warga masyarakat yang harus direlokasi sebagai akibat adanya program pemerintah yang harus dilakukan di lokasi pemukiman, sehingga capaian target kinerja layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat dipenuhi.

IV. 4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :



Tabel 4.17.
Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan
SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	285.631.800,00	277.980.500,00	97,32
1	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	222.294.100,00	219.015.000,00	98,52
2	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	63.337.700,00	58.965.500,00	93,10
B.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.183.904.800,00	2.167.733.050,00	99,26
1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	153.173.150,00	142.479.400,00	93,02
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.390.731.650,00	1.385.253.650,00	99,61
3	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	640.000.000,00	640.000.000,00	100,00
C.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	319.503.700,00	309.021.375,00	96,72
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	135.000.000,00	134.750.000,00	99,81
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	184.503.700,00	174.271.375,00	94,45
JUMLAH		2.789.040.300,00	2.754.734.925,00	98,77

IV. 5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan menurut jabatan sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 4.18.

Data Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya	1
2.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
3.	Kepala Seksi Kawasan Pemukiman	1
4.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian	1
5.	Kepala Seksi Perumahan dan Gedung	1
6.	Jabatan Fungsional Umum	9
7.	Pranta Komputer Pelaksana Lanjutan	1
JUMLAH		15

IV. 6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensinya;
- b. Capaian SPM Bidang Perumahan belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena kemampuan anggaran yang terbatas dibandingkan dengan pemenuhan capaian SPMnya, disamping itu di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat kegiatan pembangunan dengan konsekuensi relokasi warga, mengingat lahan yang masih cukup luas untuk kegiatan pembangunan.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :



- a. Perlu adanya dukungan anggaran yang berasal dari APBD khususnya APBN;
- b. Perlunya bimbingan teknis (BIMTEK) untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota;

V. Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

V. 1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal SubUrusan Bencana Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;

Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat,
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana,
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

V. 2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan



Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.19.
Target dan Indikator SPM
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

V. 3. Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.20.
Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	jumlah warga negara yang mendapatkan	0	0%



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
	Ketertiban Masyarakat	layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		
			Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum dan perkada	10	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jumlah warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	664	100%
			jumlah warga negara yang seharusnya mendapatkan layanan informasi rawan bencana	664	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	664	100%
			jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	664	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	118.435	100%
			jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	118.435	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	17	100%
			jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	17	



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
			kebakaran dalam 1 (satu) tahun		

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Capaian layanan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat adalah sebesar 0%, hal ini karena pada proses penertiban dan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), tidak ditemukan warga yang harus mendapatkan layanan rehabilitasi sebagai akibat dari penegakan hukum tersebut.

V. 4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.21.

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Program / Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.654.488.805	7.536.244.304	98,46



No	Program / Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.208.500	28.208.500	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.130.787.555	6.034.145.202	98,42
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.180.000	44.180.000	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	725.751.880	722.390.536	99,54
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.230.000	47.230.000	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	341.376.620	326.424.366	95,62
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	336.954.250	333.665.700	99,02
B	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.095.192.600	2.020.231.600	96,42
1	Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.070.563.200	1.996.182.600	96,41
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24.629.400	24.049.000	97,64
	Total	9.749.681.405	9.556.475.904	98,02

V. 5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan dalam jabatan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 4.22.
Data Personil SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1
2.	Kepala Bidang Penegakan Operasi	1
3.	Kepala Seksi Pengendalian Operasi	1
4.	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	1
5.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Linmas	1
6.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Pol.PP	1
7.	Bidang Perlindungan Masyarakat	1
8.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	1
9.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	1
10.	Polisi Pamong Praja	27
11.	Fungsional Umum	11
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
13.	Kepala Bidang Koordinasi Rehabilitasi dan Kedaruratan	1
14.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1
15.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1
16.	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran	1
17.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1
18.	Jabatan Fungsional Umum	10
JUMLAH		63

V.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :



- a. Belum adanya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.
- d. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- e. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.
- f. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana.
- g. Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana.
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana.
- i. Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.
- b. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.



- c. Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- d. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
- e. Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian.
- f. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.

VI. Sosial

VI. 1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa SPM bidang Sosial terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota,
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota,
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota, serta
- d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.



VI. 2.Target Pencapaian SPM oleh daerah

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemberian pelayanan dasar bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan rencana/target pemenuhan SPM dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel 4.23.

Target dan Indikator SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap	100%

VI. 3.Realisasi Capaian SPM

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, berikut disampaikan realisasi dari masing-masing jenis layanan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.24.



Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah WN penyandang disabilitas yg memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dalam 1 tahun	3	100%
			Jumlah WN penyandang disabilitas skala Kab. dalam 1 tahun yg seharusnya mendapatkan layanan rehabilitasi di luar panti	3	
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	Jumlah anak terlantar yg memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti dalam 1 tahun	0	0
			Jumlah anak terlantar skala Kab. dalam 1 tahun yang seharusnya mendapatkan layanan sosial diluar panti	0	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dalam 1 tahun	0	0
			Jumlah lanjut usia terlantar yg seharusnya mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti dalam 1 tahun	0	
4	Rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti dalam 1 tahun	0	0
			Jumlah gelandangan dan dan pengemis yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dalam 1 tahun	0	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan	Jumlah korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa	25.139	100%



No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Komponen	Volume	Kinerja
		sosial selama masa tanggap	tanggap darurat dalam 1 tahun		
			Jumlah korban bencana skala Kabupaten yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	25.139	

Berdasarkan dari tabel diatas, bahwa pelayanan dasar di bidang urusan sosial yaitu :

1. Pelayanan dasar untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti belum sesuai target yang telah di tentukan, hal ini karena tidak terdapat penyandang disabilitas terlantar di kabupaten kapuas Hulu
2. Pelayanan dasar untuk rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti dan pelayanan dasar untuk rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti tidak terdapatnya anak terlantar, gelandangan ataupun pengemis di daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pelayanan dasar untuk Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti tidak sesuai target dikarenakan tidak ada lanjut usia terlantar di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Pelayanan dasar untuk Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana sudah mencapai sesuai target 100%.

VI.4. Alokasi Anggaran

Dalam hal pemenuhan SPM bidang Sosial sesuai rencana/target yang telah ditetapkan, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan anggaran. Pada Tahun 2021 Dinas Sosial,



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian alokasi dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.25

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan SPM Bidang Sosial

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	341.240.000,00	340.940.000,00	99,91
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	335.240.000,00	335.240.000,00	100,00
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
B.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	65.771.800,00	63.940.047,00	97,21
1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	65.771.800,00	63.940.047,00	97,21
C.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.417.972.980,00	4.059.241.100,00	91,88
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.356.608.980,00	3.998.877.100,00	91,79
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	61.364.000,00	60.364.000,00	98,37



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
D.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	88.253.600,00	86.647.600,00	98,18
1	Pelayanan Dukungan Psikososial	25.253.600,00	23.647.600,00	93,64
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
E.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	39.682.600,00	39.332.600,00	99,12
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.682.600,00	39.332.600,00	99,12
JUMLAH		4.952.920.980,00	4.590.101.347,00	92,6746

VI. 5. Dukungan Personil

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai SPM, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang diklasifikasikan berdasarkan jabatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.26.

Data Personil SPM Bidang Sosial

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1
2.	Kepala Bidang Sosial	1
3.	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	1
4.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	1
5.	Fungsional Umum	5
JUMLAH		9



VI. 6. Permasalahan dan Solusi

Dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada bidang Sosial, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menemui beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
2. Tidak ada Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan gepeng di Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Dari permasalahan sebagaimana diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.
2. meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS, TKSK, PKH dan Organisasi Sosial Lainnya untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
4. Memberikan pelayanan rehabilitasi Sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas yang miskin dan kurang mampu Di luar panti.





BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu adalah Laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 merupakan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memuat capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :

1. pelaksanaan urusan konkuren di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, administrasi kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan dan perpustakaan.
2. pelaksanaan urusan pilihan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari urusan perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, transmigrasi
3. pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari unsur penunjang perencanaan dan



keuangan, manajemen keuangan, pengadaan, kepegawaian serta transparansi publik.

Selain memuat capaian kinerja urusan pemerintahan sebagaimana disampaikan diatas, LPPD Kabupaten Kapuas Hulu juga memuat Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang menggambarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada masing-masing sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 serta Laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi SPM 6 (enam) bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Sosial serta Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pada hakekatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun demikian pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021 dan hingga sampai saat ini belum berakhir tentunya menyebabkan beberapa capaian kinerja menjadi tidak optimal bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat beberapa peningkatan di beberapa urusan namun masih belum sebaik capaian kinerja pada tahun 2019. Penyelenggaraan Pemerintahan masih bertahap bangkit kembali dengan tetap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Penyelenggaraan pemerintahan tersebut juga tentunya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha yang tidak dapat dilepaskan dari itikad baik, kerja keras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan urusannya masing-masing, khususnya Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik, Lembaga Profesi, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama dan seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu lainnya.

Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berdasarkan Indikator Kinerja Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Hasil (Outcome) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang



Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah dicapai pada tahun 2021 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan pada tahun-tahun sebelumnya mengingat masih terdapat kinerja yang belum memenuhi harapan yang disebabkan oleh berbagai macam kendala dan keterbatasan.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan capaian kinerja tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah sebelumnya. Capaian kinerja IKU pada tahun 2021 akan menjadi umpan balik dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga RPJMD yang akan disusun nantinya dapat menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan pada akhirnya akan dapat menunjang peningkatan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Capaian kinerja yang masih rendah pada Indikator Kinerja Keluaran (Output), Indikator Kinerja Hasil (Outcome) dan Indikator Kinerja Utama yang disebabkan karena masih terdapat kekurangan, kelemahan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021. Terhadap hal tersebut akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Diharapkan pada proses evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan



pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil (HEBAT).